

Research papers

Penyusun

Muhammad Hanri
Andhika Putra Pratama
Calista Endrina Dewi
Muhammad Amin Rizky
Utomo Noor Rachmanto

Koordinator

Emmanuel Fourmann
Isabelle Ensarguet

Ketika Informasi Menyuburkan Transformasi Sosial di Indonesia

Memahami dan
Mengatasi Ketimpangan
di Luar Jawa melalui
Penyebaran Hasil
Diagnostik



AGUSTUS 2025
Nomor 361

Agence française de développement

Papiers de recherche

Les *Papiers de Recherche de l'AFD* ont pour but de diffuser rapidement les résultats de travaux en cours. Ils s'adressent principalement aux chercheurs, aux étudiants et au monde académique. Ils couvrent l'ensemble des sujets de travail de l'AFD : analyse économique, théorie économique, analyse des politiques publiques, sciences de l'ingénieur, sociologie, géographie et anthropologie. Une publication dans les *Papiers de Recherche de l'AFD* n'en exclut aucune autre.

Les opinions exprimées dans ce papier sont celles de son (ses) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement celles de l'AFD. Ce document est publié sous l'entière responsabilité de son (ses) auteur(s) ou des institutions partenaires.

Research Papers

AFD Research Papers are intended to rapidly disseminate findings of ongoing work and mainly target researchers, students and the wider academic community. They cover the full range of AFD work, including: economic analysis, economic theory, policy analysis, engineering sciences, sociology, geography and anthropology. *AFD Research Papers* and other publications are not mutually exclusive.

The opinions expressed in this paper are those of the author(s) and do not necessarily reflect the position of AFD. It is therefore published under the sole responsibility of its author(s) or its partner institutions.

When Information Feeds Social Transformation in Indonesia

Understanding and Addressing Inequality Outside Java through Diagnostic Dissemination

Auteurs

Muhammad Hanri

LPEM FEB UI

Andhika Putra Pratama

LPEM FEB UI

Calista Endrina Dewi

LPEM FEB UI

Muhammad Amin Rizky

LPEM FEB UI

Utomo Noor Rachmanto

LPEM FEB UI

Coordination

Emmanuel FOURMANN (AFD)

Isabelle ENSARGUET (AFD)

Abstract

Although Indonesia has recorded progress in reducing national income inequality over the past decade—evident in the decline of the Gini coefficient from 0.409 in 2012 to 0.384 in 2021—substantial disparities remain at the provincial and district levels.

The findings of this report emphasize that inequality in Indonesia extends beyond income distribution, encompassing access to education, healthcare, infrastructure, and economic opportunities. These inequalities are further compounded by geographic isolation, governance challenges, exposure to natural disasters, and uneven economic transformation.

Although it is one of the SDGs internationally adopted and followed, “reducing inequality” is the result of an internal process within a given society, resulting simultaneously from initial dotation, history, economic and social policies and existing social contract.

The Inequality Diagnostic gives statistical measures of the situation and, when disseminated, is also transformative, because it asks the question of the acceptability of the results, and displays several directions which could be addressed in order to reduce inequality.

The present Activity report offers an analytical insight into four provinces out of Java — Central Sulawesi, Bengkulu, Papua, and East Kalimantan—as regional case studies that reflect diverse inequality dynamics. Each province received the diagnostic differently, according to its geographical location or regional specificities. And each province presents specific challenges, requiring tailored policy interventions and sustained engagement from both government (central and local) and development partners:

The report outlines strategic policy recommendations for central and local governments. Development partners are also encouraged to explore blended finance mechanisms to mobilize private sector investment in underserved regions. Critical sectors are renewable energy, infrastructure, and education, ensuring that economic development initiatives contribute to reducing inequality. Furthermore, development partners should advocate for and support the

implementation of environmental and social safeguards in large-scale projects.

This Inequality Diagnostic Report offers thus a robust foundation for guiding policymakers, stakeholders, and development partners in designing more effective interventions to address inequality in Indonesia. The findings emphasize the importance of localized, data-driven policies that are responsive to the unique challenges of each region. Sustained collaboration between national and local governments, civil society, the private sector, and international development agencies is essential to promoting inclusive and equitable development across Indonesia’s diverse regions.

Keywords

inequalities, multidimensional inequalities, regional inequalities, regional policies public action.

Areas

Indonesia, Indo-Pacific, Asia

Original version

English

Accepted

July 2025

Abstrak

Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan nasional selama satu dekade terakhir, yang terlihat dari penurunan koefisien Gini dari 0,409 pada tahun 2012 menjadi 0,384 pada tahun 2021, ketimpangan yang signifikan masih terjadi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Temuan dalam laporan ini menegaskan bahwa ketimpangan di Indonesia tidak hanya terbatas pada distribusi pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Ketimpangan ini diperparah oleh isolasi geografis, tantangan tata kelola, paparan terhadap bencana alam, serta transformasi ekonomi yang tidak merata.

Meskipun “pengurangan ketimpangan” merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diadopsi secara global, pencapaiannya merupakan hasil dari proses internal dalam suatu masyarakat. Proses ini dipengaruhi oleh kondisi awal, sejarah, kebijakan ekonomi dan sosial, serta kontrak sosial yang berlaku.

Kajian *Inequality Diagnostic* ini menyajikan ukuran statistik mengenai situasi ketimpangan,

dan pada saat diseminasi, memiliki dampak transformatif karena mempertanyakan sejauh mana kondisi tersebut dapat diterima, serta mengemukakan sejumlah arah kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan.

Laporan Kegiatan ini menyajikan analisis mendalam terhadap empat provinsi di luar Pulau Jawa—Sulawesi Tengah, Bengkulu, Papua, dan Kalimantan Timur, sebagai studi kasus regional yang mencerminkan dinamika ketimpangan yang beragam. Setiap provinsi merespons kajian ini secara berbeda, tergantung pada lokasi geografis dan karakteristik regionalnya masing-masing. Setiap wilayah juga menghadapi tantangan spesifik yang membutuhkan intervensi kebijakan yang kontekstual serta keterlibatan berkelanjutan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta para mitra pembangunan.

Laporan ini merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah. Para mitra pembangunan juga didorong untuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan campuran (*blended finance*) guna mendorong investasi sektor swasta di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Sektor-sektor prioritas meliputi energi terbarukan, infrastruktur,

dan pendidikan, guna memastikan bahwa inisiatif pembangunan ekonomi turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan. Selain itu, mitra pembangunan perlu mendorong dan mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan sosial dalam proyek-proyek berskala besar.

Dengan demikian, Laporan *Inequality Diagnostic* ini menyediakan landasan yang kuat bagi para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan mitra pembangunan untuk merancang intervensi yang lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan di Indonesia. Temuan-temuan laporan ini menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data, bersifat lokal, dan responsif terhadap tantangan unik di masing-masing wilayah. Kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga pembangunan internasional menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci:

ketimpangan, ketimpangan multidimensional, ketimpangan regional, kebijakan regional, aksi publik.

Wilayah kajian:

Indonesia, Indo-Pasifik, Asia.

Pendahuluan

Sebelum memasuki analisis di tingkat regional, penting untuk meninjau kembali diagnosis nasional yang menjadi dasar laporan ini. Diagnosis nasional menyajikan lanskap ketimpangan di Indonesia dari perspektif multidimensional, meliputi kondisi pasar tenaga kerja, kesenjangan dalam modal manusia, perbedaan spasial, serta ketimpangan gender. Tinjauan nasional ini memberikan landasan empiris dan konseptual dalam memahami variasi antarwilayah. Oleh karena itu, temuan-temuan di tingkat regional perlu ditempatkan dalam kerangka nasional yang lebih luas, dengan mempertimbangkan baik tren yang bersifat umum maupun tantangan yang spesifik di masing-masing wilayah.

Tentang Ketimpangan di Indonesia

Pengurangan ketimpangan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan global, sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-10: "Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara." SDGs menekankan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif dalam pembagian kemakmuran, tidak hanya melalui pengurangan ketimpangan pendapatan, tetapi juga dengan mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan ini menyerukan jaminan kesempatan yang setara bagi semua orang dan penghapusan praktik diskriminatif yang menghambat individu maupun kelompok untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Inklusi menjadi kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ketimpangan ekstrem dapat merusak kohesi sosial, meningkatkan potensi konflik sosial dan politik, serta mengganggu pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Ketimpangan, seperti halnya kemiskinan, bersifat multidimensional. Ketimpangan tercermin tidak hanya dari perbedaan pendapatan dan kekayaan, tetapi juga dari ketimpangan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur fisik, dan konektivitas digital. Kesenjangan ini terjadi di berbagai wilayah, sektor, dan kelompok demografis, dan dapat memperburuk ketimpangan yang sudah ada. Oleh karena itu, upaya pengurangan ketimpangan

memerlukan pendekatan yang lebih luas. Pendekatan ini harus melampaui redistribusi pendapatan dan berfokus pada penghapusan hambatan struktural terhadap akses yang adil terhadap peluang dan sumber daya.

Di Indonesia, ketimpangan merupakan tantangan yang kompleks. Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, ketimpangan tetap tinggi di berbagai wilayah dan kelompok penduduk. Selama satu dekade terakhir, koefisien Gini sebagai indikator umum ketimpangan pendapatan menunjukkan tren menurun, dari 0,41 pada tahun 2013 menjadi 0,38 pada tahun 2020. Namun, tingkat ini masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Distribusi kekayaan yang tidak merata paling terlihat antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan juga lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan, yang menunjukkan keberadaan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi yang hidup berdampingan dengan kelompok berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan.

Ketimpangan yang terus berlangsung menghambat dasar-dasar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat membatasi akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, mengurangi peluang kerja yang layak, dan menghambat akumulasi modal manusia. Di Indonesia, kelompok rentan seperti perempuan, pekerja informal, serta penduduk di wilayah pedesaan dan terpencil masih menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan perlindungan sosial. Ketiadaan akses terhadap layanan esensial ini memperkuat siklus kemiskinan dan eksklusif sosial, serta membatasi mobilitas sosial dan partisipasi ekonomi.

Pengenalan terhadap sifat multidimensional dari ketimpangan menjadi penting dalam merancang kebijakan yang efektif. Ketimpangan di Indonesia tidak hanya tercermin dalam perbedaan pendapatan dan konsumsi, tetapi juga dalam kepemilikan aset, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hasil di pasar tenaga kerja, serta ketersediaan

infrastruktur seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan konektivitas digital. Ketimpangan spasial juga masih sangat mencolok, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar. Ketimpangan gender pun masih terjadi. Perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah, proporsi pekerjaan informal yang lebih tinggi, dan akses yang lebih terbatas terhadap mekanisme perlindungan sosial.

Untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang mengatasi kesenjangan secara vertikal (antarindividu) maupun horizontal (antarkelompok). Kebijakan perlu difokuskan pada perluasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, perbaikan kondisi pasar tenaga kerja, formalisasi sektor informal, dan pemerataan infrastruktur serta layanan publik. Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berperan penting sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan. Namun, efektivitas dan cakupan program-program ini masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

Upaya Indonesia untuk mengurangi ketimpangan sejalan dengan komitmen nasional dalam SDGs, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Ketiga kerangka kebijakan ini menegaskan pentingnya pengurangan ketimpangan sebagai prasyarat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mendekatnya masa bonus demografi dan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, mengatasi ketimpangan menjadi semakin mendesak agar potensi sumber daya manusia dapat dimaksimalkan dan kemakmuran ekonomi dapat dirasakan secara luas.

Pengurangan ketimpangan bukan hanya keharusan moral, tetapi juga kebutuhan strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Mengatasi akar penyebab ketimpangan dan memastikan akses yang adil terhadap peluang dan layanan akan memperkuat kohesi sosial, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Oleh

karena itu, temuan dalam Laporan Inequality Diagnostic ini menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang intervensi berbasis bukti yang mendukung agenda pembangunan nasional dan komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun.

Diagnostik Ketimpangan: Proses Riset Kolaboratif antara ACEIR dan BPS

Sebagai respons terhadap kebutuhan yang semakin mendesak untuk memahami ketimpangan secara komprehensif di Indonesia, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), melakukan studi diagnostik mendalam mengenai ketimpangan. Riset ini, yang dikenal sebagai Inequality Diagnostic for Indonesia, dirancang untuk memberikan analisis menyeluruh mengenai dinamika ketimpangan di Indonesia dari berbagai dimensi. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas yang didukung oleh Agence Française de Développement (AFD) melalui European Union's Research Facility on Inequality. Studi ini mengikuti kerangka metodologis yang dikembangkan oleh African Centre of Excellence for Inequality Research (ACEIR), yang menekankan pentingnya pengukuran dan analisis ketimpangan multidimensi, mencakup dimensi ekonomi, sosial, spasial, dan demografis.

Alih-alih hanya berfokus pada kesenjangan pendapatan, studi diagnostik ini menelaah beragam indikator, termasuk dinamika pasar tenaga kerja, akses terhadap aset fisik dan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan konektivitas digital.

Riset ini dilakukan dalam kerja sama erat dengan BPS, dengan memanfaatkan data nasional seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dan Potensi Desa (PODES). Ketiga sumber data ini memungkinkan analisis yang komprehensif di tingkat nasional maupun regional. Metodologi yang digunakan sejalan dengan pendekatan ACEIR, memastikan kesesuaian dengan standar internasional dalam pelaksanaan studi diagnostik

ketimpangan. Penggunaan metodologi yang konsisten dan dapat diperbandingkan secara internasional memperkuat validitas temuan sekaligus memungkinkan benchmarking antarnegara.

Melalui dukungan AFD dan European Union's Research Facility on Inequality, LPEM FEB UI mampu membangun kapasitas analitis, melakukan analisis statistik lanjutan, dan menghasilkan temuan berbasis bukti untuk mendukung pengembangan kebijakan. Bantuan teknis dari ACEIR turut memberikan arahan dalam pengukuran dan analisis ketimpangan multidimensi, sehingga meningkatkan mutu dan ketelitian studi ini.

Fase teknis dari riset ini diselesaikan pada tahun 2023, yang menghasilkan laporan akhir beserta sejumlah rekomendasi kebijakan. Kegiatan diseminasi nasional dilaksanakan pada 14 November 2023 di Jakarta. Acara ini menjadi peluncuran resmi laporan akhir dan dihadiri oleh perwakilan tingkat tinggi dari Pemerintah Indonesia, mitra pembangunan internasional, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam forum tersebut, dipaparkan temuan utama dari studi diagnostik ketimpangan, diikuti dengan diskusi panel mengenai respons kebijakan dan arah kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia.

Temuan-temuan dalam laporan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan berbasis bukti, sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan komitmen global dalam SDGs, khususnya SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan.

Fokus pada Ketimpangan Regional

Dengan menyadari pentingnya perspektif regional dan konteks lokal dalam memahami ketimpangan, LPEM FEB UI bersama BPS serta didukung oleh AFD dan Uni Eropa, menyelenggarakan serangkaian lokakarya diseminasi regional pada pertengahan tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di lokasi-lokasi strategis yang mewakili berbagai kawasan di Indonesia, yaitu Bengkulu (Sumatra), Balikpapan (Kalimantan), Palu (Sulawesi), dan Jayapura (Papua/Kawasan Timur Indonesia). Setiap lokakarya regional mempertemukan

pejabat pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan perwakilan masyarakat untuk membahas temuan laporan diagnostik dan memberikan masukan terkait relevansinya terhadap tantangan lokal.

Diseminasi regional ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memvalidasi temuan-temuan dalam laporan diagnostik dengan mengintegrasikan pengetahuan dan perspektif lokal. Kedua, memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar pemangku kepentingan untuk mendorong dialog mengenai isu ketimpangan yang spesifik di setiap wilayah serta solusi kebijakan yang relevan. Ketiga, memperkuat kapasitas para aktor lokal dengan memperkenalkan alat dan metodologi yang digunakan dalam studi diagnostik, sehingga mendukung agenda kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah.

Masukan yang diperoleh selama kegiatan diseminasi memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana ketimpangan muncul secara berbeda di berbagai daerah. Para peserta menyoroti berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap layanan dasar di wilayah terpencil, ketimpangan gender dalam partisipasi angkatan kerja, serta keterbatasan cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Di beberapa wilayah, isu infrastruktur seperti listrik dan air bersih juga diangkat sebagai hambatan yang masih signifikan dalam upaya mengurangi ketimpangan.

Berbagai masukan ini menjadi dasar penting dalam penyempurnaan rekomendasi kebijakan yang disampaikan dalam laporan akhir. Melalui keterlibatan langsung dengan pemangku kepentingan di daerah, LPEM FEB UI memastikan bahwa temuan dan intervensi yang diusulkan benar-benar mencerminkan kondisi riil yang dihadapi oleh komunitas lokal. Diseminasi ini juga membangun ruang kolaboratif bagi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, serta mitra internasional untuk bekerja bersama secara terkoordinasi dan menyeluruh dalam menangani ketimpangan.

Dengan memadukan keahlian LPEM FEB UI, dukungan data dan kelembagaan dari BPS, serta kontribusi teknis dan pendanaan dari AFD dan Uni Eropa, inisiatif ini menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kolaborasi dengan ACEIR juga memastikan bahwa metodologi dan temuan studi ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan global mengenai ketimpangan, sekaligus membuka ruang bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan belajar dari negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

Makalah ini akan mengulas terlebih dahulu dimensi regional yang teridentifikasi dalam studi diagnostik nasional, kemudian dilanjutkan dengan laporan tentang diskusi dan persepsi lokal yang muncul dalam kegiatan diseminasi. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa studi diagnostik bukan sekadar informatif, tetapi juga bertujuan untuk menjadi transformatif.

1. Menelaah Ketimpangan di Indonesia melalui Pendekatan Diagnostik dan Perspektif Regional

Salah satu temuan utama dari Inequality Diagnostic di Indonesia adalah penurunan ketimpangan ekonomi secara keseluruhan dalam satu dekade terakhir. Koefisien Gini nasional, yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan yang banyak digunakan, menurun dari 0,409 pada tahun 2012 menjadi 0,384 pada tahun 2021. Tren ini mencerminkan kemajuan yang moderat namun konsisten menuju distribusi pendapatan yang lebih merata di tingkat nasional. Indikator ketimpangan pelengkap, seperti Indeks Theil ($GE(0)$ dan $GE(1)$), Indeks Atkinson ($A(1)$ dan $A(2)$), serta Rasio Palma, menunjukkan tren penurunan yang serupa. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa ketimpangan di Indonesia secara umum telah menurun dalam berbagai dimensi distribusi pendapatan.

Tabel 1. Berbagai Indikator Ketimpangan, 2012–2021

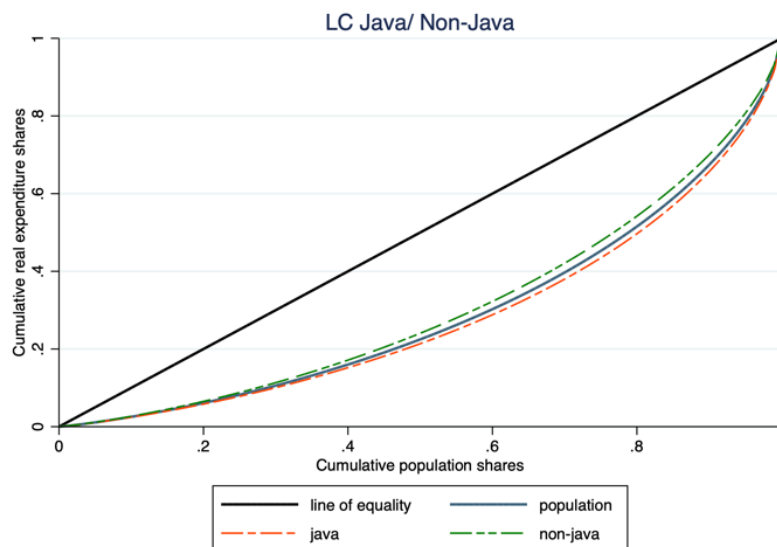
Variable	Sub-group	Year	Gini Coefficient	Theil's Indices		Atkinson Indices		Palma Ratio
				$GE(0)$	$GE(1)$	$A(1)$	$A(2)$	
Total Population		2012	0.409	0.273	0.339	0.239	0.371	1.953
		2015	0.408	0.272	0.333	0.238	0.372	1.948
		2018	0.389	0.249	0.280	0.220	0.362	1.755
		2021	0.384	0.242	0.279	0.215	0.350	1.720

Sumber: perhitungan penulis berdasarkan data Susenas (2023)

Meskipun menunjukkan perbaikan, tingkat ketimpangan di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan, seperti Vietnam dan Thailand. Selain itu, penurunan ketimpangan terjadi secara tidak merata. Pulau Jawa, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi Indonesia, menunjukkan tingkat pendapatan rata-rata yang lebih tinggi sekaligus tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Kekayaan yang dihasilkan di Pulau Jawa tidak terdistribusi secara merata di antara penduduknya, mencerminkan tantangan struktural dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan.

Ketimpangan juga terlihat jauh lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Meskipun pusat-pusat kota memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dan infrastruktur yang lebih baik, terdapat kesenjangan pendapatan yang mencolok antar kelompok penduduk. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan redistributif yang secara khusus ditujukan untuk wilayah perkotaan, guna mengatasi kesenjangan pendapatan yang semakin melebar dan memastikan bahwa kemakmuran kota dapat dirasakan secara lebih merata.

Gambar 1. Kurva Lorenz Tahun 2021



Sumber: perhitungan penulis berdasarkan data Susenas (2023)

1.1. Kerentanan Pasar Tenaga Kerja: Pekerjaan Informal dan Pengangguran Lulusan Vokasi

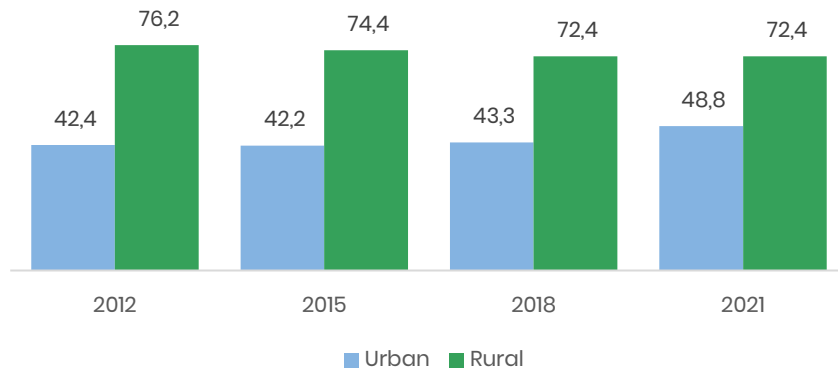
Pasar tenaga kerja di Indonesia masih menghadapi dua tantangan utama yang memiliki implikasi langsung terhadap ketimpangan. Pertama, tingkat pekerjaan informal mengalami peningkatan, khususnya di wilayah perkotaan. Pada tahun 2012, sebanyak 42,4 persen pekerja di perkotaan bekerja di sektor informal. Angka ini meningkat menjadi 48,8 persen pada tahun 2021. Perkembangan ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan terhadap pekerjaan informal akibat terbatasnya peluang kerja di sektor formal, terutama di wilayah yang mengalami urbanisasi pesat.

Pekerjaan informal umumnya tidak memberikan jaminan kerja, perlindungan sosial, maupun standar ketenagakerjaan yang diatur secara hukum. Pekerja di sektor informal sering kali menerima upah rendah, menghadapi kondisi kerja yang buruk, dan lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Meningkatnya informalitas di pasar tenaga kerja perkotaan menegaskan perlunya reformasi pasar kerja yang mendorong formalisasi dan memperluas akses perlindungan sosial bagi pekerja informal.

Kedua, laporan ini menyoroti kesenjangan pengangguran yang terus berlangsung di kalangan lulusan pendidikan vokasi. Meskipun pemerintah telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong pendidikan vokasi sebagai jalur masuk ke dunia kerja, tingkat pengangguran lulusan vokasi masih mencapai 11,1 persen pada tahun 2021. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran lulusan SMA umum yang berada pada angka 9,1 persen. Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap relevansi dan kualitas program pelatihan vokasi, serta efektivitas mekanisme pencocokan antara lulusan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan vokasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja. Memperkuat kemitraan antara sekolah vokasi dan dunia industri, meningkatkan kualitas pelatihan praktik, serta memperbaiki layanan penempatan kerja merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi ketidaksesuaian ini.

Gambar 1. Persentase Pekerja Informal di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan



Sumber: perhitungan penulis berdasarkan data Susenas (2023)

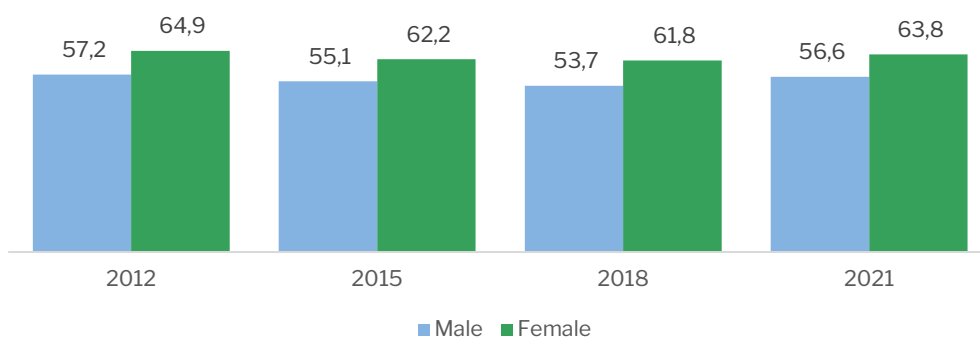
1.2. Kesenjangan Gender yang Persisten dalam Partisipasi Angkatan Kerja dan Pekerjaan Informal

Ketimpangan gender masih menjadi isu yang meluas di pasar tenaga kerja Indonesia. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki mencapai 82,3 persen, sedangkan perempuan hanya 53,3 persen. Kesenjangan yang signifikan ini mencerminkan masih kuatnya hambatan terhadap partisipasi perempuan di pasar kerja, termasuk peran gender tradisional, tanggung jawab pengasuhan anak, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang berkualitas.

Perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja juga secara tidak proporsional lebih banyak bekerja di sektor informal, yang semakin meningkatkan kerentanan ekonomi mereka. Pada tahun 2021, sebanyak 63,8 persen pekerja perempuan bekerja secara informal, dibandingkan dengan 56,6 persen pekerja laki-laki. Pekerjaan informal umumnya memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih sedikit, sehingga memperburuk ketidakamanan ekonomi perempuan dan mengurangi ketahanan mereka terhadap guncangan keuangan.

Upaya untuk menutup kesenjangan gender perlu difokuskan pada perluasan akses perempuan terhadap pekerjaan formal, pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif gender, serta penyediaan layanan pendukung seperti penitipan anak yang terjangkau dan cuti orang tua. Selain itu, penting untuk menghapus praktik diskriminatif dalam proses perekrutan dan di tempat kerja guna menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih inklusif.

Gambar 2. Persentase Pekerja Informal menurut Jenis Kelamin



Sumber: perhitungan penulis berdasarkan data Susenas (2023)

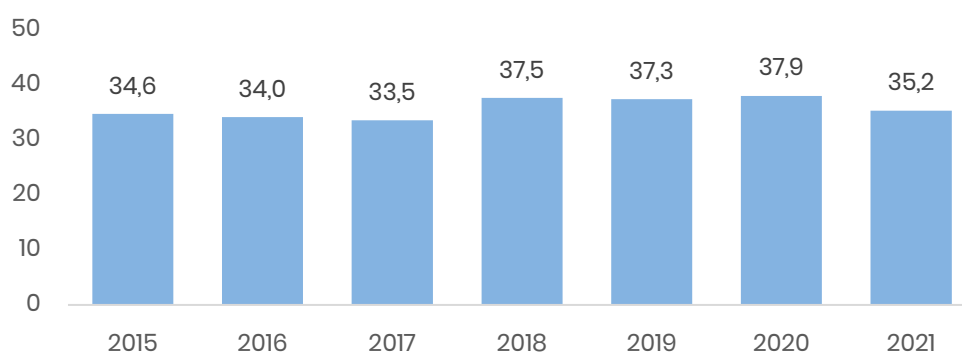
1.3. Kemajuan dalam Pendidikan Dasar, namun Penurunan Angka Partisipasi Pendidikan Pra-Dasar Menimbulkan Kekhawatiran

Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar. Hingga tahun 2021, angka partisipasi murni nasional untuk jenjang pendidikan dasar mencapai 97,8 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah seperti Program Wajib Belajar 12 Tahun, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program-program ini telah mengurangi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan dan memperluas jangkauan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, terdapat tren yang mengkhawatirkan dalam pendidikan pra-dasar. Angka partisipasi untuk pendidikan anak usia dini menunjukkan penurunan selama lima tahun terakhir, dari 37,5 persen pada tahun 2018 menjadi 35,2 persen pada tahun 2021. Pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam tahap perkembangan awal anak. Keterbatasan akses terhadap pendidikan pra-dasar dapat memperbesar ketimpangan jangka panjang, karena berpotensi menurunkan kesiapan belajar dan hasil belajar di masa depan.

Untuk mengatasi penurunan ini, diperlukan perluasan ketersediaan layanan pendidikan pra-dasar yang terjangkau, terutama di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal. Investasi dalam pelatihan guru pendidikan anak usia dini, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan guna meningkatkan angka partisipasi dan memastikan bahwa semua anak memiliki landasan pendidikan yang kuat.

Gambar 3. Angka Partisipasi Pendidikan Usia Dini 2015–2021 (%)



Sumber: Kementerian Pendidikan (2022)

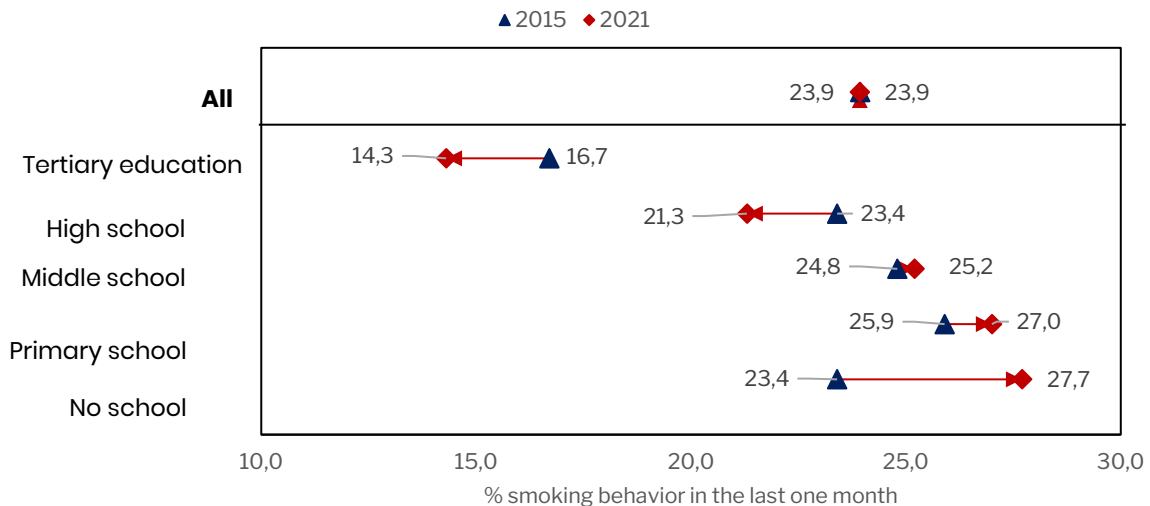
1.4. Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta Meningkatkan Akses, namun Menghadapi Tantangan Keberlanjutan akibat Pola Perilaku Kesehatan

Pelaksanaan Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah secara signifikan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan di Indonesia sejak diluncurkan pada tahun 2014. Program ini mewajibkan seluruh warga negara untuk memiliki jaminan kesehatan, dengan dukungan subsidi iuran dari pemerintah bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Meskipun capaian tersebut patut diapresiasi, sistem UHC masih menghadapi tantangan keberlanjutan. Tingkat kepatuhan dalam pembayaran iuran masih menjadi perhatian, dan banyak pekerja di sektor informal—yang dikenal sebagai "kelompok menengah yang belum terjangkau"—belum terlindungi secara memadai. Selain itu, perilaku hidup tidak sehat, seperti tingginya prevalensi merokok, menambah beban pada sistem layanan kesehatan.

Laporan ini menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat merokok yang lebih tinggi. Hal ini berkontribusi terhadap beban penyakit tidak menular dan peningkatan biaya layanan kesehatan. Penguatan kampanye kesehatan publik, penegakan kebijakan pengendalian tembakau, serta peningkatan literasi kesehatan merupakan langkah-langkah penting untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang sistem UHC di Indonesia.

Gambar 4. Prevalensi Merokok menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: perhitungan penulis berdasarkan data Susenas (2021)

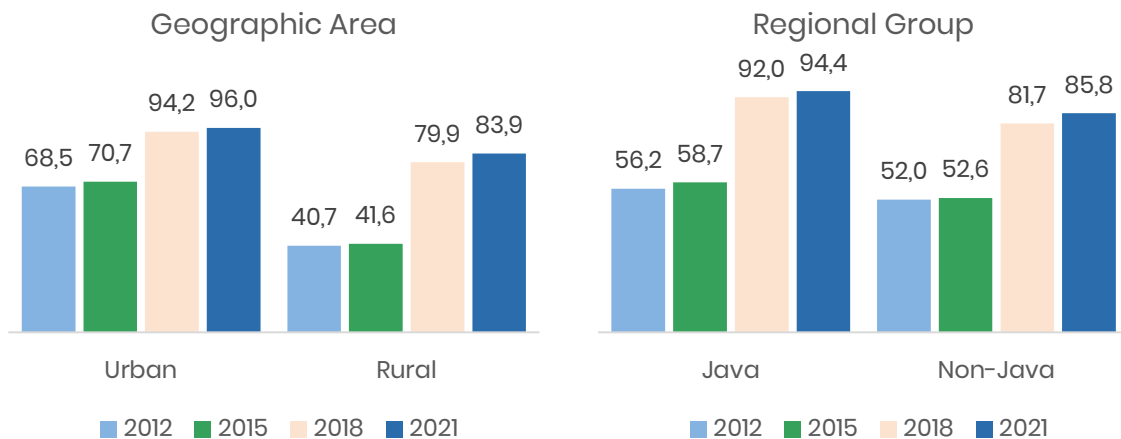
1.5. Kesenjangan Geografis dalam Akses terhadap Infrastruktur dan Layanan Dasar

Terlepas dari berbagai upaya pemerintah untuk memperluas pembangunan infrastruktur, kesenjangan akses terhadap layanan dasar masih terjadi secara signifikan di seluruh wilayah Indonesia. Daerah di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur dan Kalimantan, masih tertinggal dalam hal akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan konektivitas internet.

Sebagai contoh, banyak kota di Indonesia bagian timur mencatat tingkat akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi layak yang masih rendah. Demikian pula, ketersediaan air minum yang aman masih menjadi tantangan di Kalimantan dan Indonesia timur, di mana pembangunan infrastruktur belum sejalan dengan rata-rata nasional.

Untuk menjembatani kesenjangan antarwilayah ini, diperlukan investasi publik yang terarah dalam infrastruktur dan layanan dasar. Para pembuat kebijakan perlu memprioritaskan wilayah-wilayah yang belum terlayani secara memadai guna memastikan akses yang setara terhadap layanan dasar. Hal ini merupakan prasyarat penting dalam mengurangi ketimpangan spasial dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Gambar 5. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%) menurut Wilayah Geografis/Kelompok Regional, 2012–2021



Sumber: SUSENAS, perhitungan penulis (2023)

Strategi pembangunan regional yang terarah diperlukan untuk menjembatani kesenjangan spasial yang masih terjadi. Investasi publik perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal, dengan fokus pada peningkatan akses terhadap layanan dasar dan konektivitas. Sejalan dengan itu, mekanisme transfer fiskal seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa perlu diperkuat guna memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil serta kesesuaian yang lebih baik dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kebijakan desentralisasi juga perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau program-program pembangunan secara efektif. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa investasi publik benar-benar menghasilkan perbaikan dalam layanan serta dampak sosial yang nyata.

2. Memperkuat Kebijakan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan untuk Mengatasi Ketimpangan

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah mencatat kemajuan penting dalam upaya mengurangi ketimpangan melalui serangkaian reformasi kebijakan yang signifikan. Namun demikian, ketimpangan yang bersifat multidimensional—yang tercermin dalam kesenjangan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, hasil di pasar tenaga kerja, serta ketersediaan infrastruktur—masih terus berlangsung. Kondisi ini menuntut pendekatan kebijakan yang lebih menyeluruh dan inklusif ke depan.

Laporan *Inequality Diagnostic* untuk Indonesia menekankan pentingnya penerapan kerangka multidimensional dalam merancang kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan. Berikut adalah rekomendasi kebijakan utama yang disusun berdasarkan temuan laporan ini, yang menggambarkan arah strategis bagi Indonesia dalam mencapai jalur pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.1. Menyelaraskan Kembali Prioritas Perlindungan Sosial dan Belanja Publik

Upaya Indonesia dalam mengurangi ketimpangan selama ini banyak bertumpu pada program perlindungan sosial yang terarah dan transfer publik yang ditujukan untuk mendukung kelompok miskin dan rentan. Keputusan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 untuk mengurangi subsidi energi telah mengalihkan sumber daya fiskal dalam jumlah besar ke arah pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial. Realokasi fiskal ini dikaitkan dengan penurunan tingkat ketimpangan pada tahun-tahun awal masa kepemimpinannya.

Ke depan, diperlukan penyesuaian kembali terhadap prioritas belanja publik guna menyeimbangkan investasi infrastruktur fisik dengan pembangunan infrastruktur sosial, khususnya pengembangan sumber daya manusia. Meskipun proyek infrastruktur berskala besar telah meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi antardaerah, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial—terutama di wilayah yang belum terlayani dan daerah terpencil—akan menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan spasial yang terus berlangsung.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan progresivitas program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), dengan memperbaiki mekanisme penargetan dan memperluas cakupan manfaat hingga mencakup kelompok hampir miskin dan pekerja sektor informal yang sering kali tidak terlindungi oleh sistem jaminan sosial formal.

2.2. Menjamin Keberlanjutan dan Inklusivitas Cakupan Kesehatan Semesta (UHC)

Sistem Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) di Indonesia, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada tahun 2014, telah secara signifikan memperluas akses terhadap layanan kesehatan. Dengan menyubsidi iuran bagi kelompok miskin dan mewajibkan seluruh warga negara untuk terdaftar, program ini berhasil mempersempit kesenjangan akses layanan kesehatan dan turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan di bidang kesehatan.

Meskipun demikian, keberlanjutan sistem UHC masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kepatuhan pembayaran iuran di kalangan pekerja sektor informal—kelompok yang dikenal sebagai "kelas menengah yang belum terjangkau"—masih menjadi persoalan. Kelompok ini sering kali tidak memiliki asuransi yang disediakan oleh pemberi kerja dan tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi pemerintah, sehingga menciptakan celah dalam cakupan perlindungan dan melemahkan keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, reformasi kebijakan perlu diarahkan pada pemberian insentif bagi partisipasi pekerja informal, misalnya melalui penyesuaian iuran berbasis penghasilan atau skema subsidi yang dikaitkan dengan mekanisme pajak progresif.

Kedua, perilaku kesehatan masyarakat, seperti tingginya prevalensi merokok dan meningkatnya konsumsi produk tinggi gula di kalangan peserta JKN, turut meningkatkan beban biaya layanan kesehatan dan mengancam keberlanjutan jangka panjang sistem UHC. Oleh karena itu, intervensi kesehatan masyarakat perlu diperkuat guna menurunkan konsumsi tembakau dan makanan tidak sehat. Kebijakan yang dapat diterapkan antara lain peningkatan cukai, regulasi yang lebih ketat terhadap iklan produk berisiko, serta kampanye edukasi publik yang lebih luas tentang pola hidup sehat. Mengatasi risiko perilaku ini akan membantu menurunkan beban penyakit tidak menular dan mendukung sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan.

2.3. Menanggapi Tantangan Pasar Tenaga Kerja: Informalitas dan Ketidaksesuaian Keterampilan

Kondisi pasar tenaga kerja tetap menjadi salah satu faktor utama pendorong ketimpangan di Indonesia. Laporan *Inequality Diagnostic* mengidentifikasi dua isu yang saling berkaitan, yaitu tingginya tingkat pekerjaan informal dan ketidaksesuaian yang terus berlangsung antara keterampilan lulusan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.

Sekitar setengah dari angkatan kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal, dengan tingkat informalitas yang lebih tinggi di kalangan perempuan dan di wilayah perdesaan. Pekerja informal tidak memiliki jaminan kerja, akses yang terbatas terhadap perlindungan sosial, serta sering kali menerima upah yang rendah dan tidak stabil. Mengatasi permasalahan informalitas memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk penyederhanaan proses pendaftaran usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan regulasi ketenagakerjaan untuk mendorong perekrutan secara formal, serta perluasan akses terhadap program jaminan sosial bagi pekerja informal.

Di sisi lain, meskipun pemerintah telah melakukan investasi besar dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi, lulusan pendidikan vokasi masih menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan lulusan pendidikan umum. Ketidaksesuaian ini mencerminkan adanya persoalan struktural dalam penyelarasan kurikulum pelatihan vokasi dengan dinamika kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi antara penyedia pelatihan vokasi dan sektor swasta agar kurikulum yang dikembangkan lebih responsif terhadap permintaan pasar kerja saat ini dan di masa depan. Selain itu, pengembangan program pemagangan, magang industri, dan pembelajaran berbasis kerja dapat meningkatkan kesiapan kerja lulusan serta mempermudah transisi dari sekolah ke dunia kerja.

2.4. Mendorong Kesenjangan Gender dalam Partisipasi Angkatan Kerja

Kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja masih sangat lebar, dengan perempuan menghadapi hambatan yang lebih besar untuk memasuki pekerjaan formal dan cenderung terpusat di sektor informal. Kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ini perlu difokuskan pada penghapusan hambatan struktural terhadap partisipasi perempuan dalam pasar kerja, termasuk perluasan akses terhadap layanan penitipan anak yang terjangkau, promosi skema kerja yang fleksibel, serta penegakan undang-undang antidiskriminasi dalam proses perekrutan dan praktik ketenagakerjaan.

Perluasan akses perempuan terhadap peluang kerja formal dan peran kepemimpinan dapat memberikan dampak transformatif terhadap kesejahteraan rumah tangga dan pembangunan ekonomi secara lebih luas. Penting bagi reformasi pasar kerja dan program perlindungan sosial untuk dirancang secara responsif terhadap isu gender guna mewujudkan hasil pasar tenaga kerja yang lebih berkeadilan.

2.5. Mengurangi Ketimpangan Spasial Melalui Pembangunan Daerah yang Terarah

Kesenjangan geografis merupakan sumber ketimpangan yang signifikan di Indonesia, terutama antara Pulau Jawa dan pulau-pulau luar, termasuk Indonesia bagian timur, Kalimantan, dan sebagian wilayah Sulawesi. Ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar—seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan layanan digital—memperburuk ketimpangan antarwilayah dan membatasi peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah yang belum terlayani.

2.6. Memperkuat Sistem Data dan Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti

Laporan *Inequality Diagnostic* menekankan pentingnya ketersediaan data yang andal dan berkualitas tinggi untuk memahami sifat dan penyebab ketimpangan. Penguatan sistem data di Indonesia sangat penting untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif dan berbasis bukti. Hal ini mencakup peningkatan cakupan dan kualitas survei rumah tangga, data ketenagakerjaan, serta indikator sektoral, terutama di tingkat subnasional.

Upaya juga perlu diarahkan pada integrasi data lintas kementerian dan lembaga, serta peningkatan akses publik terhadap data yang berkaitan dengan ketimpangan. Kemitraan dengan institusi akademik dan organisasi internasional dapat memperkuat kapasitas Indonesia dalam melakukan analisis dan evaluasi kebijakan berbasis data. Penting untuk memastikan bahwa data ketimpangan tersedia dalam bentuk terpilah menurut jenis kelamin, wilayah geografis, dan status sosial ekonomi guna mengidentifikasi kesenjangan secara akurat dan merancang respons kebijakan yang tepat sasaran.

2.7. Mendorong Pendekatan Multidimensional dalam Pengurangan Ketimpangan

Sebagaimana ditekankan dalam kerangka diagnostik yang dikembangkan oleh African Centre of Excellence for Inequality Research (ACEIR), upaya mengurangi ketimpangan memerlukan pendekatan multidimensional yang melampaui sekadar redistribusi pendapatan. Kebijakan perlu menjangkau kesenjangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepemilikan aset, dan akses terhadap layanan dasar.

Indonesia perlu mengadopsi strategi pengurangan ketimpangan yang terintegrasi lintas sektor dan area kebijakan, serta memastikan konsistensi antara tujuan pembangunan nasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan prioritas sektoral. Koordinasi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan akan sangat penting untuk mengatasi berbagai dimensi ketimpangan secara terpadu.

2.8. Merancang Strategi untuk Mengurangi Ketimpangan dan Meningkatkan Kualitas Hidup di Indonesia

Ke depan, pendekatan ganda yang mencakup prioritas jangka pendek dan jangka panjang sangat penting untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah segera perlu difokuskan pada mitigasi kesenjangan sosial ekonomi yang akut dan perlindungan bagi kelompok masyarakat paling rentan. Sementara itu, reformasi struktural diperlukan untuk mengatasi akar penyebab ketimpangan dan meletakkan fondasi bagi pertumbuhan yang lebih merata dalam jangka panjang.

2.8.1. Prioritas Jangka Pendek: Memperkuat Perlindungan Sosial dan Intervensi Terarah

Dalam jangka pendek, Indonesia perlu memperkuat sistem perlindungan sosial untuk meredam dampak guncangan sosial ekonomi yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Program jaring pengaman sosial pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan pangan seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), telah berkontribusi dalam

menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Namun demikian, cakupan dan kecukupan program-program tersebut masih perlu ditingkatkan agar benar-benar menjangkau kelompok marjinal dan rentan secara efektif.

2.8.2. Meningkatkan Program Bantuan Tunai dan Jaring Pengaman Sosial yang Terarah

Kebijakan jangka pendek perlu difokuskan pada perluasan dan peningkatan ketepatan sasaran program bantuan tunai. Penargetan yang presisi sangat penting untuk meminimalkan kesalahan eksklusi dan inklusi, terutama bagi rumah tangga hampir miskin yang sering kali tidak tercakup dalam bantuan formal, meskipun sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Implementasi sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan langkah maju dalam proses identifikasi penerima manfaat, namun pembaruan data yang berkelanjutan dan integrasi lintas lembaga masih diperlukan untuk menjaga efektivitasnya.

Bantuan tunai yang tepat sasaran juga menjadi kunci untuk mengurangi dampak regresif dari kebijakan fiskal yang akan datang. Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerapan pajak karbon, meskipun diperlukan untuk keberlanjutan fiskal dan tujuan lingkungan, berisiko membebani rumah tangga berpendapatan rendah melalui peningkatan biaya hidup. Untuk mengatasi dampak ini, Indonesia perlu memperluas skema kompensasi berupa bantuan tunai dan subsidi yang tepat sasaran, guna memastikan bahwa konsolidasi fiskal tidak memperdalam kemiskinan atau memperlebar ketimpangan.

2.8.3. Memperluas Akses Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal

Mengingat tingginya tingkat informalitas di pasar tenaga kerja Indonesia—terutama di wilayah perkotaan dan di kalangan perempuan—perluasan cakupan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal menjadi prioritas. Program yang ada saat ini seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan harus dibuat lebih mudah diakses oleh pekerja informal melalui proses pendaftaran yang sederhana, skema iuran yang fleksibel, serta insentif untuk mendorong partisipasi.

2.8.4. Prioritas Jangka Panjang: Reformasi Struktural untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam jangka panjang, kemampuan Indonesia untuk mengurangi ketimpangan sangat bergantung pada keberhasilannya dalam mengatasi tantangan struktural. Laporan *Inequality Diagnostic* mengidentifikasi sejumlah area kunci yang membutuhkan perhatian kebijakan secara berkelanjutan, termasuk revitalisasi industri, transformasi pasar tenaga kerja, reformasi pendidikan, dan transisi energi yang berkelanjutan.

2.8.5. Revitalisasi Sektor Manufaktur untuk Mendorong Pertumbuhan Lapangan Kerja Inklusif

Indonesia telah mengalami deindustrialisasi yang signifikan dalam dua dekade terakhir, dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja yang terus menurun. Kontraksi sektor ini telah mengurangi peluang kerja produktif dan formal, terutama bagi pekerja dengan keterampilan rendah dan menengah. Revitalisasi sektor manufaktur menjadi krusial untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan mendorong mobilitas ekonomi.

Kebijakan industri yang komprehensif diperlukan untuk mendorong manufaktur bernilai tambah, inovasi, dan adopsi teknologi. Fokus kebijakan harus mencakup peningkatan investasi asing dan domestik, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM), serta perbaikan infrastruktur dan logistik untuk meningkatkan daya saing. Di samping itu, penguatan keterkaitan antara sektor manufaktur dan sistem pendidikan vokasi akan memastikan bahwa angkatan kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

2.8.6. Mempersiapkan Transisi Energi yang Adil dan Inklusif

Transisi Indonesia menuju energi terbarukan merupakan kebutuhan lingkungan sekaligus peluang untuk mendefinisikan ulang model pertumbuhan nasional. Namun, transisi ini juga membawa risiko terhadap pasar tenaga kerja, khususnya bagi pekerja di sektor energi konvensional seperti pertambangan batu bara dan industri bahan bakar fosil. Untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang mengantisipasi dan memitigasi potensi dampak sosial.

Kebijakan ini mencakup program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi pekerja yang terdampak, agar dapat beralih ke industri hijau baru. Pengembangan mekanisme perlindungan sosial bagi komunitas yang terdampak—khususnya di wilayah penghasil batu bara—penting untuk mencegah guncangan ekonomi lokal dan memperburuk ketimpangan. Investasi dalam infrastruktur energi terbarukan juga perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja di daerah perdesaan dan wilayah yang kurang berkembang guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata secara spasial.

2.8.7. Mereformasi Sistem Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan

Laporan Inequality Diagnostic menyoroti kesenjangan yang masih berlangsung dalam akses dan hasil pendidikan, terutama di jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan vokasi. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di semua jenjang sangat penting untuk mengurangi ketimpangan antargenerasi dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tantangan masa depan.

Tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dan tren ini perlu dibalik melalui perluasan layanan pendidikan pra-dasar yang terjangkau, khususnya di wilayah yang belum terlayani. Di saat yang sama, sistem pendidikan dan pelatihan vokasi (VET) perlu direformasi agar kurikulumnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan industri, perluasan program magang, serta peningkatan kualitas pengajaran dan fasilitas merupakan strategi kunci untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pelatihan vokasi.

3. Memetakan dan Memahami Ketimpangan Serta Tantangan Pembangunan Antarwilayah di Tingkat Provinsi

Ketimpangan yang terus berlangsung merupakan salah satu tantangan paling signifikan dalam agenda pembangunan Indonesia. Meskipun terdapat kemajuan yang terukur dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di tingkat nasional selama dekade terakhir, kesenjangan yang mencolok masih terjadi di tingkat subnasional. Ketimpangan ini mencerminkan kesenjangan yang lebih dalam dan bersifat multidimensional, tidak hanya dalam hal distribusi pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi.

Pulau Jawa, yang menampung hampir separuh dari total populasi Indonesia, menikmati infrastruktur dan layanan publik yang relatif lebih maju. Sementara itu, banyak wilayah di luar Jawa—khususnya Indonesia bagian timur, Kalimantan, dan sebagian Sumatra—masih menghadapi tantangan struktural dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan modal manusia, dan akses terhadap layanan dasar.

3.1. Perencanaan Diseminasi Regional

Untuk memahami lebih dalam kesenjangan antarwilayah, kami memilih empat provinsi yang mewakili keberagaman geografis, konteks sosial ekonomi, dan relevansi dalam perdebatan kebijakan ketimpangan saat ini:

1. Sulawesi Tengah, sebagai wilayah yang sedang memulihkan diri dari bencana alam besar, menyoroti bagaimana bencana dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.
2. Bengkulu, sebagai salah satu provinsi dengan tingkat industrialisasi terendah di Indonesia, mencerminkan tantangan dalam transformasi ekonomi struktural dan ketidaksesuaian pasar tenaga kerja.
3. Papua, yang meskipun menerima alokasi fiskal yang besar, tetap mengalami keterbelakangan pembangunan. Kasus ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara tata kelola, kekurangan modal manusia, dan ketimpangan regional.
4. Kalimantan Timur, dalam konteks proyek pemindahan ibu kota negara (IKN Nusantara), memberikan gambaran tentang risiko dan peluang dari strategi pembangunan berbasis wilayah.

Fokus pada tingkat provinsi memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap dimensi spasial ketimpangan. Melalui lensa ini, laporan ini menggarisbawahi faktor-faktor umum maupun spesifik wilayah yang membentuk dinamika ketimpangan di Indonesia.

Rangkaian kegiatan diseminasi yang diselenggarakan pada tahun 2024 di Palu, Bengkulu, Jayapura, dan Samarinda menjadi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan lokal untuk menanggapi temuan laporan, memvalidasi interpretasi data, serta memberikan rekomendasi kebijakan dari perspektif regional. Keterlibatan ini telah memperkaya analisis dan memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan berpijak pada realitas lokal.

3.2. Dari Data Nasional Menuju Realitas Regional

Kegiatan diseminasi ini dirancang untuk menyampaikan temuan utama dari Laporan Inequality Diagnostic kepada berbagai kalangan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, kalangan akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil. Di setiap provinsi, tim LPEM FEB UI memaparkan temuan laporan secara komprehensif, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel dan sesi umpan balik bersama para pemangku kepentingan daerah.

Diskusi yang berlangsung selama kegiatan ini tidak hanya mengungkap tantangan ketimpangan yang bersifat khas wilayah, tetapi juga menyoroti inisiatif lokal yang inovatif dan strategi yang dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan nasional.

Bagian berikut ini memberikan ringkasan kegiatan diseminasi, termasuk bentuk keterlibatan audiens, perbedaan perspektif mengenai ketimpangan di tiap provinsi, serta tantangan utama dalam implementasi program pengurangan kesenjangan. Selain itu, bagian ini juga merangkum rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan daerah untuk menjawab kesenjangan indikator ketimpangan dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada bagian-bagian selanjutnya, akan dibahas secara lebih mendalam masing-masing dari keempat wilayah tersebut. Setiap bagian akan meninjau temuan dari diagnostik nasional yang relevan dengan kondisi wilayah, respons dari para pemangku kepentingan setempat, serta hasil dan pelajaran utama yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan kebijakan publik ke depan yang bertujuan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia.

Karena kegiatan ini berlangsung di kampus universitas di masing-masing daerah, maka disertakan pula deskripsi singkat mengenai institusi pendidikan tinggi tersebut untuk memperkuat konteks lokal dari setiap bab.

Kota-Kota yang Dipilih untuk Diseminasi Laporan Diagnostik di Luar Jawa



4. Kota Palu (Sulawesi): Ketika Bencana Alam Memperburuk Ketimpangan ...

4.1. Tinjauan Awal di Tingkat Regional

Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ibu kota di Kota Palu, merepresentasikan lanskap pembangunan sosial ekonomi yang kompleks, yang dibentuk oleh tantangan struktural sekaligus bencana alam. Sebagai salah satu provinsi di wilayah timur Indonesia, Sulawesi Tengah menghadapi kesenjangan pembangunan yang terus berlangsung jika dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Permasalahan seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan tingginya proporsi pekerjaan informal telah lama menjadi ciri dari profil ketimpangan di provinsi ini. Tantangan-tantangan tersebut semakin diperparah oleh peristiwa gempa bumi dan tsunami yang dahsyat pada tahun 2018.

4.1.1. Gempa Bumi dan Tsunami 2018: Memperlebar Ketimpangan Sosial Ekonomi

Pada tanggal 28 September 2018, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang disusul oleh tsunami dan likuifaksi tanah melanda Sulawesi Tengah, dengan dampak paling parah terjadi di Kota Palu serta Kabupaten Donggala dan Sigi. Menurut AHA Centre (2018), bencana ini mengakibatkan lebih dari 4.300 korban jiwa dan memaksa hampir 200.000 orang mengungsi. Kerusakan infrastruktur vital—termasuk jalan, jembatan, sistem penyediaan air bersih, sekolah, dan fasilitas kesehatan—secara drastis menghambat penyediaan layanan dasar dan memperdalam ketimpangan akses yang telah ada sebelumnya.

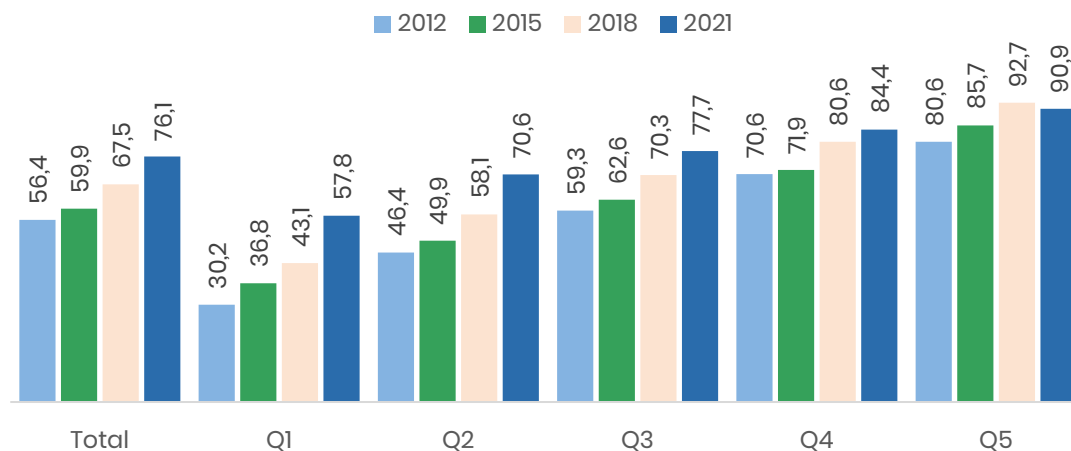
Kegiatan ekonomi di wilayah terdampak mengalami gangguan yang signifikan. Sebagaimana disorot oleh Prasad et al. (2015), bencana berskala besar cenderung mengurangi ketersediaan tenaga kerja, menurunkan permintaan konsumen, serta mengacaukan pasar lokal dan rantai pasok. Di Sulawesi Tengah, bencana tersebut menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas usaha lokal, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), banyak di antaranya tidak dapat kembali beroperasi akibat kerusakan infrastruktur dan keterbatasan modal. Gangguan ekonomi ini sangat berdampak pada pekerja sektor informal, yang merupakan bagian besar dari angkatan kerja di Kota Palu dan umumnya tidak terlindungi oleh sistem jaminan sosial formal.

4.1.2. Pemulihan Pascabencana dan Ketimpangan yang Berlangsung

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam proses rekonstruksi pascabencana, pemulihan berjalan secara tidak merata. Menurut Laporan Inequality Diagnostic untuk Sulawesi Tengah (LPEM FEB UI, 2024), Kota Palu menunjukkan tingkat pemulihan yang lebih cepat dalam hal rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan aktivitas ekonomi. Namun, wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Donggala dan Sigi masih tertinggal. Kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi masih mencolok antara pusat kota dan wilayah pedesaan di sekitarnya.

Secara khusus, komunitas pedesaan yang terdampak bencana melaporkan kesulitan yang terus berlangsung dalam mengakses layanan publik. Sebagai contoh, akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi layak masih berada di bawah rata-rata nasional di daerah-daerah tersebut, meskipun telah dilakukan berbagai intervensi pemerintah. Distribusi program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur publik cenderung terpusat di Kota Palu, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan spasial.

Gambar 6. Persentase Penduduk dengan Akses terhadap Sanitasi Layak menurut Kelompok Pengeluaran di Sulawesi Tengah



Sumber: SUSENAS, perhitungan penulis (2023)

4.1.3. Tantangan dan Kerentanan Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja di Sulawesi Tengah mencerminkan tren nasional yang ditandai oleh tingginya tingkat informalitas, namun tantangan ini menjadi lebih akut akibat dampak bencana. Data dari kajian diagnostik menunjukkan bahwa proporsi pekerja sektor informal di wilayah perkotaan Palu meningkat secara signifikan pascabencana, seiring dengan menurunnya peluang kerja di sektor formal. Pekerja informal, khususnya di sektor perdagangan dan jasa, menghadapi tingkat kerentanan yang lebih tinggi akibat ketiadaan jaminan kerja dan keterbatasan akses terhadap program perlindungan sosial.

Selain itu, tingkat pengangguran di kalangan lulusan pendidikan vokasi di Palu dan daerah sekitarnya tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Meskipun pemerintah telah mendorong pendidikan vokasi sebagai jalur peningkatan daya saing tenaga kerja, masih terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang diberikan oleh lembaga pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal. Minimnya layanan penempatan kerja dan terbatasnya diversifikasi industri turut memperburuk permasalahan ini (LPEM FEB UI, 2024).

4.1.4. Kepemilikan Aset dan Modal Fisik

Kerusakan aset fisik seperti rumah, kendaraan, dan peralatan kerja akibat bencana tahun 2018 secara tidak proporsional menimpa rumah tangga berpendapatan rendah, yang banyak di antaranya kehilangan satu-satunya aset produktif yang dimiliki. Berdasarkan data dalam Laporan Inequality Diagnostic, indeks aset di Sulawesi Tengah menunjukkan kesenjangan yang semakin besar setelah bencana, dengan rumah tangga di daerah pedesaan seperti Donggala dan Sigi mencatat skor yang jauh lebih rendah dibandingkan rumah tangga perkotaan di Palu. Pemulihan kepemilikan aset berjalan lambat dan tidak merata, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan ekonomi di dalam provinsi.

4.1.5. Ketimpangan Gender

Kajian diagnostik ketimpangan juga menyoroti kesenjangan gender yang masih bertahan dalam partisipasi angkatan kerja dan kualitas pekerjaan di Sulawesi Tengah. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan konsentrasi tinggi di sektor informal dan berupah rendah. Situasi pascabencana semakin meminggirkan perempuan pekerja, banyak di antaranya menghadapi peningkatan tanggung jawab pengasuhan serta menurunnya peluang ekonomi. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan secara khusus diidentifikasi berada pada risiko kemiskinan dan eksklusi yang lebih tinggi dari program pemulihan (LPEM FEB UI, 2024).

4.2. Pandangan Pemangku Kepentingan terhadap Ketimpangan Wilayah di Sulawesi

Di Sulawesi Tengah, perwakilan pemerintah daerah menyampaikan perkembangan terkini terkait pelaksanaan program rekonstruksi pascabencana. Mereka memaparkan sejumlah proyek infrastruktur yang difokuskan pada pemulihan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang rusak akibat gempa dan tsunami tahun 2018. Namun, para pejabat juga mengakui bahwa upaya pemulihan cenderung lebih banyak menguntungkan wilayah perkotaan, khususnya Kota Palu, sementara masyarakat di wilayah pedesaan seperti Donggala dan Sigi masih tertinggal dalam hal rehabilitasi infrastruktur dan penyediaan layanan.

Para pejabat menyampaikan kekhawatiran bahwa rekonstruksi fisik saja tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi yang lebih dalam di provinsi ini. Mereka menekankan pentingnya kebijakan pelengkap yang berfokus pada pengembangan modal manusia dan perluasan perlindungan sosial bagi komunitas yang masih rentan secara ekonomi setelah bencana. Selama kegiatan diseminasi, sejumlah perwakilan pemerintah juga menyampaikan permintaan dukungan dari institusi penelitian untuk mengevaluasi dampak sosial ekonomi jangka panjang dari program pemulihan. Mereka juga menyatakan ketertarikan untuk memahami bagaimana investasi rekonstruksi dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, terutama melalui penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi dan jasa.

Box 1. Universitas Tadulako

Universitas Tadulako (Untad) merupakan perguruan tinggi negeri terbesar dan terkemuka di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Awalnya didirikan sebagai institusi swasta pada tahun 1963, Universitas Tadulako resmi menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 1981 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1981. Sejak saat itu, Untad berkembang pesat menjadi pusat pendidikan tinggi dan penelitian yang penting di kawasan Indonesia Timur. Kampus utamanya terletak di Kota Palu, ibu kota provinsi, dan melayani mahasiswa dari berbagai wilayah, khususnya dari Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan bagian timur Indonesia lainnya. Berdasarkan data terbaru, Universitas Tadulako memiliki lebih dari 40.000 mahasiswa yang tersebar di berbagai fakultas, dengan jenjang program sarjana, magister, hingga doktor.

Universitas Tadulako dikenal atas komitmennya terhadap pembangunan daerah, terutama dalam memperluas akses pendidikan ke wilayah-wilayah terpencil. Perguruan tinggi ini juga berperan penting dalam upaya pemulihan pascabencana pascagempa dan tsunami tahun 2018, melalui kontribusi di bidang pengembangan masyarakat, ketangguhan bencana, serta penelitian kebijakan publik yang berfokus pada pengurangan ketimpangan wilayah.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tadulako merupakan institusi akademik dan riset yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi regional. FEB didirikan untuk menjawab kebutuhan akan tenaga profesional dan pembuat kebijakan ekonomi di provinsi ini. Fakultas ini menawarkan berbagai program pendidikan, termasuk program sarjana di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi, serta program magister di bidang ekonomi pembangunan dan ilmu manajemen.

FEB Untad menekankan riset terapan dengan fokus regional, mencakup isu-isu seperti penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Fakultas ini juga dikenal aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, dan lembaga pembangunan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan berbasis bukti. Melalui Pusat Studi Pengembangan Ekonomi (Pusdep), FEB Untad telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya dalam bidang perencanaan ekonomi regional, ekonomi kebencanaan, dan strategi pertumbuhan yang inklusif.

Di Kota Palu, diskusi akademik difokuskan pada konteks rekonstruksi pascabencana yang menjadi latar pembangunan provinsi ini. Para akademisi mengakui besarnya investasi infrastruktur yang dilakukan setelah gempa bumi dan tsunami tahun 2018, tetapi mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa investasi tersebut belum menghasilkan pemulihan ekonomi yang inklusif. Mereka menyoroti bahwa upaya rekonstruksi banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya Kota Palu, sementara kabupaten-kabupaten di sekitarnya seperti Donggala dan Sigi masih tertinggal. Dari perspektif ekonomi, provinsi ini juga masih bergantung pada sektor pertanian dan jasa informal, yang dinilai membatasi potensi pertumbuhan. Para akademisi menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang secara khusus mendorong pengembangan sektor swasta dan diversifikasi ekonomi, ketimpangan antara kota dan desa akan terus berlangsung.

Pendidikan juga diidentifikasi sebagai faktor kunci di Sulawesi Tengah. Para akademisi mencatat bahwa meskipun tingkat partisipasi sekolah telah pulih sejak bencana, banyak siswa di daerah terdampak masih menghadapi hambatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Kerusakan infrastruktur sekolah, disertai pengungsian keluarga dan hilangnya pendapatan rumah tangga, berdampak negatif terhadap kehadiran dan hasil belajar siswa. Kurangnya program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal juga membatasi kemampuan generasi muda untuk bertransisi menuju pekerjaan yang stabil.

Para mahasiswa menunjukkan komitmen normatif yang kuat terhadap isu keadilan dalam proses pemulihan pascabencana. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya terbatas pada rekonstruksi fisik, tetapi juga mencakup isu keadilan sosial, seperti distribusi bantuan yang merata dan keterlibatan komunitas marjinal dalam perencanaan pemulihan. Banyak mahasiswa menyuarakan rasa frustrasi terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan menilai bahwa ketimpangan bukan sekadar tantangan pembangunan, tetapi juga kegagalan moral dalam kebijakan publik. Perspektif ini tercermin dalam seruan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah yang bertujuan mengurangi ketimpangan.

4.3. Hasil Utama dari Kegiatan Diseminasi

Sesi diseminasi berlangsung di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), di mana tim LPEM mempresentasikan laporan secara langsung kepada perwakilan instansi, sehingga memungkinkan diskusi yang bermakna dan pengumpulan masukan yang berharga.

Dalam sesi diskusi, salah satu pertanyaan yang mencuat terkait ketimpangan sosial dalam kepemilikan aset fisik. Isu ini sangat relevan di Sulawesi Tengah, di mana gempa dan tsunami tahun 2018 menghancurkan banyak rumah dan aset produktif lainnya, sehingga memperdalam kesenjangan kepemilikan aset di seluruh wilayah. Bencana tersebut, yang berpusat di antara wilayah Sigi dan Donggala, menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 911 juta dolar AS, 4.340 korban jiwa, 4.438 korban luka berat, 667 orang hilang, 206.494 orang mengungsi, dan 68.451 bangunan hancur (Mason et al., 2021). Diskusi juga mencakup grafik indeks Gini dari tahun 2012 hingga 2021, yang menunjukkan penurunan tajam pada tahun 2018. Meskipun ada interval pengukuran tiga tahunan, dampak langsung dari bencana mungkin memerlukan analisis lebih jelas selama periode 2018–2021.

Pertanyaan lain yang muncul berkaitan dengan hubungan antara infrastruktur dan ketimpangan. Kerusakan jalan, akses air bersih, sanitasi, dan listrik menunjukkan kesenjangan signifikan dalam proses pemulihan pascabencana. Sebelum bencana tahun 2018, tren kerusakan jalan di Sulawesi Tengah menunjukkan penurunan. Namun setelah bencana, panjang jalan rusak meningkat tajam menjadi 8.352 kilometer, mencerminkan dampak besar terhadap infrastruktur. Meskipun terjadi perbaikan pada 2019 dan 2020, kerusakan jalan tetap lebih tinggi dibandingkan tingkat sebelum bencana, menunjukkan bahwa upaya pemulihan belum sepenuhnya efektif.

Berbagai organisasi berperan penting dalam penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan dan air bersih selama masa pemulihan. Dari tahun 2018 hingga 2021, terdapat kesenjangan signifikan dalam pemulihan infrastruktur antara Palu, Donggala, dan Sigi. Sebagai ibu kota provinsi, Palu pulih lebih cepat dan stabil, dengan akses air bersih meningkat dari 95,5% pada 2018 menjadi 99,2% pada 2020.

Akses sanitasi menunjukkan pola serupa, dengan Palu mencapai 99,3% pada 2020, jauh di atas Donggala dan Sigi. Sigi mengalami peningkatan dari 60,4% pada 2018 menjadi 78,3% pada 2021, tetapi tetap tertinggal dari Palu. Donggala menunjukkan kemajuan yang stabil, meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Dalam hal listrik, Palu mempertahankan cakupan 100% dari 2019 hingga 2021. Donggala dan Sigi juga mengalami peningkatan signifikan pascabencana, meskipun Donggala mengalami sedikit penurunan pada 2021, dari 98,4% menjadi 96,7%. Sigi hampir mencapai 100% akses listrik pada 2021, menunjukkan adanya upaya pemulihan yang lebih kuat.

Proses pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah menyoroti ketimpangan dalam rehabilitasi infrastruktur dan alokasi sumber daya antarwilayah, terutama antara pusat kota seperti Palu dan wilayah pedesaan seperti Donggala dan Sigi. Meskipun Palu mengalami pemulihan yang relatif cepat, pemulihan di Donggala dan Sigi berjalan lebih lambat dan tidak merata, sehingga memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah ada sebelumnya.

Trajektori pemulihan yang tidak merata ini menunjukkan perlunya strategi respons bencana yang lebih adil dan inklusif, baik dalam aspek infrastruktur maupun penghidupan masyarakat terdampak. Berdasarkan pengalaman dari bencana sebelumnya, seperti tsunami Aceh pada 2004, jelas bahwa program stabilisasi penghidupan seperti bantuan tunai dan bantuan material berperan penting dalam fase awal pemulihan. Namun, program-program ini sering kali belum mampu memulihkan stabilitas ekonomi jangka panjang, karena banyak penyintas kehilangan aset produktif dan akhirnya menggunakan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk membangun kembali penghidupan (Daly et al., 2020).

Kasus Sulawesi Tengah menunjukkan pentingnya tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi lokal agar penghidupan masyarakat dapat berkelanjutan pascabencana. Seperti terlihat di wilayah terdampak bencana lainnya, ketahanan (resilience) perlu diprioritaskan daripada sekadar restorasi, dengan menekankan adaptasi terhadap kondisi baru dan pemanfaatan sumber daya lokal (Handmer & Choong, 2006). Untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pemulihan bencana di masa depan, pendekatan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh yang mencakup kebutuhan fisik dan ekonomi masyarakat terdampak menjadi sangat penting, guna memastikan bahwa pemulihan berlangsung lebih adil dan inklusif

4.4. Rekomendasi untuk Sulawesi Tengah: Memperkuat Ketangguhan Bencana dan Pemulihan yang Berkeadilan

Pengalaman Sulawesi Tengah dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami tahun 2018 menunjukkan kaitan erat antara kerentanan terhadap bencana dan ketimpangan sosial. Proses pemulihan pascabencana berlangsung tidak merata, dengan pusat kota seperti Palu pulih lebih cepat dibandingkan wilayah pedesaan seperti Donggala dan Sigi. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan peningkatan kesiapsiagaan bencana dan kerangka pemulihan yang lebih inklusif.

1. **Membentuk Dana Provinsi untuk Ketangguhan dan Pemulihan Bencana**
Mengembangkan dana khusus yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan alokasi sumber daya secara cepat dan adil dalam pemulihan pascabencana, dengan fokus pada komunitas pedesaan dan kelompok marjinal.
2. **Memperkuat Program Rekonstruksi Berbasis Komunitas dan Pemulihan Penghidupan**
Mendorong program rekonstruksi yang partisipatif dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan kembali. Program ini perlu dilengkapi dengan inisiatif pemulihan penghidupan, termasuk bantuan tunai bersyarat dan hibah kecil untuk mendukung usaha mikro dan kecil.
3. **Meningkatkan Sistem Manajemen Risiko Bencana**
Berinvestasi dalam sistem peringatan dini dan pemetaan risiko yang komprehensif di tingkat kabupaten. Perlu juga dilakukan penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana melalui simulasi rutin dan program edukasi.

4. Membangun Kembali Infrastruktur Sosial untuk Mengurangi Kesenjangan Layanan
Memprioritaskan pembangunan kembali sekolah, fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air bersih di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Penyediaan layanan ini harus adil dan selaras dengan strategi pembangunan modal manusia jangka panjang.
5. Mendorong Perencanaan Tata Ruang yang Inklusif dalam Rekonstruksi Pascabencana
Mengintegrasikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan perkotaan untuk mencegah terjadinya ketimpangan baru dalam distribusi layanan dan pembangunan infrastruktur.

5. Kota Bengkulu (Sumatra): Mendorong Diversifikasi Ekonomi

5.1. Tinjauan Awal di Tingkat Regional

Provinsi Bengkulu, yang terletak di pesisir barat daya Pulau Sumatera, merupakan salah satu wilayah yang paling terpinggirkan secara ekonomi di Indonesia. Meskipun memiliki posisi strategis di tepi Samudera Hindia, Bengkulu menghadapi tantangan yang berkelanjutan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut data BPS (2023), Bengkulu masih menjadi salah satu provinsi dengan skala ekonomi terkecil di Indonesia, berkontribusi sangat kecil terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan berada di antara provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Perekonomian provinsi ini sangat bergantung pada sektor primer, khususnya pertanian, perikanan, dan pertambangan. Meskipun sektor-sektor ini penting sebagai sumber lapangan kerja—terutama di wilayah perdesaan—tingkat produktivitasnya rendah dan nilai tambah yang dihasilkan terbatas. Aktivitas pertanian umumnya berskala kecil dan rentan terhadap fluktuasi harga serta risiko iklim. Ketergantungan terhadap sektor-sektor berproduktivitas rendah ini menjadi hambatan bagi upaya diversifikasi ekonomi dan membatasi potensi pertumbuhan yang inklusif.

Isolasi geografis memperparah tantangan pembangunan Bengkulu. Provinsi ini belum memiliki konektivitas infrastruktur yang memadai, khususnya dengan Palembang, salah satu pusat ekonomi utama di Sumatera. Jaringan transportasi yang terbatas—baik dari segi kualitas jalan maupun layanan logistik—menghambat mobilitas barang dan manusia, meningkatkan biaya logistik, serta menurunkan daya saing daerah. Konektivitas antarwilayah di dalam provinsi juga masih lemah, membatasi akses ke layanan dasar di kabupaten-kabupaten terpencil.

Laporan Diagnosis Ketimpangan untuk Provinsi Bengkulu (LPEM FEB UI, 2024) menyoroti ketimpangan multidimensi yang dihadapi provinsi ini. Meskipun koefisien Gini menunjukkan penurunan tipis dalam beberapa tahun terakhir, tren ini lebih mencerminkan penurunan konsumsi di kelompok pendapatan atas dibandingkan perbaikan nyata bagi kelompok termiskin. Ketimpangan di Bengkulu dipengaruhi oleh faktor spasial dan sektoral, dengan wilayah perdesaan dan pekerja di sektor pertanian mengalami tingkat deprivasi tertinggi.

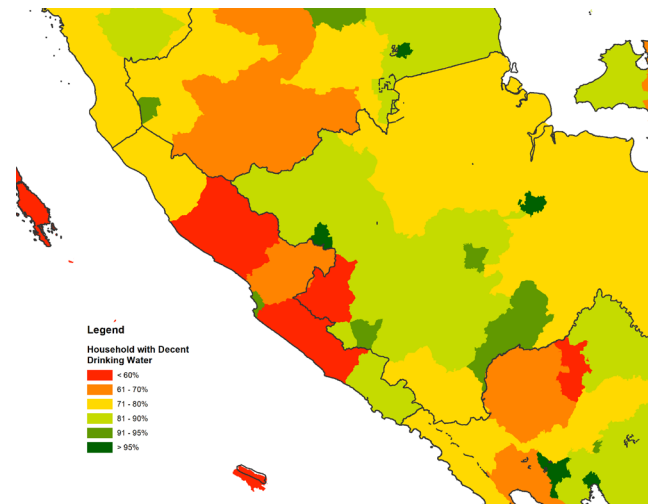
5.1.1. Akses terhadap Layanan Dasar

Akses terhadap sanitasi layak dan air minum bersih di Provinsi Bengkulu masih sangat timpang jika dilihat berdasarkan kuintil pengeluaran rumah tangga. Temuan dalam laporan diagnosis menunjukkan bahwa rumah tangga dalam kelompok pengeluaran terendah—terutama di daerah perdesaan dan terpencil—mengalami akses yang jauh lebih rendah terhadap layanan dasar dibandingkan kelompok rumah tangga yang lebih mampu. Ketimpangan ini sangat mencolok dalam cakupan akses terhadap sanitasi layak, di mana 40 persen rumah tangga terbawah memiliki tingkat akses yang jauh di bawah rata-rata provinsi maupun nasional. Ketidaksetaraan ini meningkatkan risiko terhadap penyakit yang ditularkan melalui air, sehingga memperkuat tantangan kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin. Kondisi sanitasi yang buruk juga berdampak pada tingginya prevalensi stunting anak dan berbagai bentuk deprivasi kesehatan lainnya, yang selanjutnya menghambat pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, ketimpangan dalam akses terhadap air minum bersih memperparah kerentanan yang sudah ada. Banyak rumah tangga dalam kuintil pengeluaran terbawah yang masih bergantung pada sumber air yang tidak layak, seperti sungai dan sumur tidak terlindungi, yang rentan terhadap kontaminasi. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya investasi infrastruktur di kabupaten-kabupaten seperti Mukomuko, Seluma, dan Bengkulu Utara, di mana biaya perluasan jaringan air perpipaan sangat tinggi karena kendala geografis dan logistik. Keterbatasan akses terhadap air minum aman

tidak hanya meningkatkan beban penyakit, tetapi juga menambah beban waktu dan tenaga bagi perempuan dan anak-anak, yang umumnya bertanggung jawab mengambil air dari lokasi yang jauh. Mengatasi ketimpangan ini sangat penting untuk memperbaiki hasil kesehatan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pembangunan inklusif di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

Gambar 7. Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu (%)



Sumber: SUSENAS, perhitungan penulis (2023)

5.1.2. Pendidikan dan Hasil Pasar Tenaga Kerja

Tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Bengkulu umumnya berada di bawah rata-rata nasional, terutama di wilayah perdesaan. Meskipun telah diluncurkan berbagai program pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), kesenjangan dalam angka partisipasi dan penyelesaian pendidikan masih tetap terjadi. Lulusan pendidikan vokasi di Bengkulu menghadapi tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA umum, mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara pelatihan vokasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Pasar tenaga kerja di Bengkulu didominasi oleh sektor informal, terutama di bidang pertanian dan jasa. Pekerjaan informal umumnya tidak menyediakan jaminan kerja maupun perlindungan sosial, sehingga meningkatkan kerentanan pekerja. Perempuan secara tidak proporsional lebih banyak bekerja di sektor informal, yang memperburuk ketimpangan pendapatan dan cakupan perlindungan sosial antar gender.

5.1.3. Ketimpangan Spasial dan Tantangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan spasial masih menjadi ciri utama lanskap sosial ekonomi Bengkulu. Ibu kota provinsi, Kota Bengkulu, memiliki infrastruktur dan layanan publik yang relatif lebih baik dibandingkan kabupaten-kabupaten di pinggiran seperti Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Seluma. Investasi publik secara historis lebih banyak terpusat di wilayah perkotaan, meninggalkan wilayah perdesaan dalam kondisi kurang terlayani.

Keterbatasan infrastruktur menghambat integrasi wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Tidak adanya jalur transportasi yang efisien ke pusat-pusat ekonomi seperti Palembang dan Lampung membatasi akses pasar bagi produk pertanian dan perikanan Bengkulu, sehingga menghambat kemampuan produsen lokal untuk meningkatkan skala usaha dan melakukan diversifikasi. Selain itu, risiko bencana alam seperti banjir dan longsor kerap mengganggu infrastruktur dan aktivitas ekonomi, yang semakin memperbesar kerentanan wilayah ini.

5.1.4. Bantuan Sosial dan Inisiatif Lokal

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Bengkulu. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah membantu rumah tangga rentan menghadapi guncangan ekonomi. Namun demikian, cakupan dan kecukupan program-program tersebut masih menjadi tantangan, terutama bagi pekerja informal dan masyarakat di wilayah terpencil.

Sejumlah inisiatif lokal untuk mendorong pembangunan ekonomi mencakup program One Village, One Product (OVOP) dan One Company, One Person (OCOP). Program-program ini bertujuan menumbuhkan kewirausahaan dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski menjanjikan, pelaksanaan program-program ini menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya akses pembiayaan, kurangnya pelatihan keterampilan, dan lemahnya koneksi dengan pasar.

5.1.5. Dimensi Gender dalam Ketimpangan

Ketimpangan gender di Bengkulu masih menjadi hambatan besar dalam mencapai pembangunan yang inklusif. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara konsisten lebih rendah dibandingkan laki-laki, mencerminkan adanya hambatan struktural dan sosial budaya terhadap keterlibatan ekonomi perempuan. Ketika perempuan terlibat dalam pasar tenaga kerja, mereka umumnya terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah di sektor informal, seperti pertanian, perdagangan, dan jasa domestik. Jenis pekerjaan ini umumnya tidak memberikan jaminan sosial, stabilitas kerja, maupun peluang pengembangan karier. Akibatnya, perempuan di Bengkulu lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama dalam masa krisis atau saat terjadi penurunan pendapatan rumah tangga. Peran gender tradisional dan terbatasnya akses terhadap layanan penitipan anak yang terjangkau juga membatasi kemampuan perempuan untuk bekerja secara penuh waktu di sektor formal.

Rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan tergolong paling rentan terhadap kemiskinan. Mereka kerap menghadapi hambatan ganda, termasuk akses terbatas terhadap aset produktif seperti lahan, kredit, dan teknologi. Selain itu, perempuan kepala keluarga sering mengalami kesulitan dalam mengakses program perlindungan sosial karena kendala administratif maupun stigma sosial. Inisiatif yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan—seperti pelatihan vokasi, dukungan kewirausahaan, dan skema pembiayaan mikro—masih terbatas cakupan dan efektivitasnya. Program-program ini sering kali belum mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan di wilayah perdesaan atau mereka yang bekerja di sektor informal. Untuk mengurangi kesenjangan gender, perluasan cakupan, peningkatan kualitas, serta responsivitas program terhadap tantangan nyata yang dihadapi perempuan di Bengkulu sangat diperlukan.

5.2. Perspektif Pemangku Kepentingan tentang Ketimpangan Wilayah di Sumatera

Di Bengkulu, perwakilan pemerintah provinsi menekankan komitmennya dalam menangani tantangan ketenagakerjaan, khususnya di kalangan pemuda dan lulusan pendidikan vokasi. Pemerintah provinsi telah menjalankan program seperti One Company, One Person (OCOP) dan One Village, One Product (OVOP) yang bertujuan mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja di tingkat desa. Program OCOP difokuskan pada perluasan kesempatan magang dan pelatihan kerja di perusahaan lokal, sementara OVOP memperkuat usaha berbasis desa dengan mempromosikan produk lokal. Namun, para pejabat mengakui bahwa dampak program-program ini masih terbatas. Tingkat pengangguran di kalangan lulusan vokasi tetap tinggi dan belum terlihat dampak nyata dalam mengurangi kesenjangan pendapatan. Salah satu kendala utama, menurut para pejabat, adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pelatihan vokasi dan industri lokal, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan pemberi kerja.

Beberapa pejabat juga menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten dalam mendukung inisiatif pengembangan industri yang lebih luas. Meskipun program seperti OVOP berupaya mengoptimalkan potensi desa, implementasinya sering terkendala oleh kurangnya pendampingan teknis, terbatasnya akses pasar, serta infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung perluasan skala usaha. Akibatnya, meskipun terjadi pertumbuhan jumlah usaha kecil, kontribusinya terhadap diversifikasi ekonomi regional dan penciptaan lapangan kerja masih relatif kecil. Dalam diskusi, para pejabat menyampaikan perlunya kolaborasi yang lebih erat dengan lembaga penelitian untuk mengevaluasi efektivitas program-program ini dan menjajaki strategi alternatif guna mendorong pertumbuhan ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Box 2. Universitas Bengkulu

Universitas Bengkulu (UNIB) merupakan perguruan tinggi negeri terkemuka di Provinsi Bengkulu. Universitas ini resmi didirikan pada tahun 1982 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982, meskipun kegiatan akademiknya telah dimulai sebelumnya di bawah koordinasi Universitas Sriwijaya. Berlokasi di Kota Bengkulu, UNIB telah menjadi institusi kunci pendidikan tinggi di wilayah barat Pulau Sumatra, melayani mahasiswa dari Provinsi Bengkulu maupun provinsi-provinsi tetangga. Universitas Bengkulu memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Dengan jumlah mahasiswa lebih dari 20.000 orang yang tersebar di berbagai program studi, UNIB memiliki delapan fakultas yang mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari pertanian hingga ilmu sosial dan teknik. Misi universitas ini menekankan pentingnya menghasilkan lulusan yang inovatif, kompetitif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Universitas Bengkulu juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus pada pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, dan penguatan kapasitas masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu memegang peran penting dalam mendorong penelitian dan pendidikan ekonomi di provinsi ini. FEB UNIB menawarkan program yang komprehensif di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi pada jenjang sarjana dan pascasarjana. Fakultas ini dikenal atas kontribusinya dalam penelitian isu-isu ekonomi regional, termasuk ekonomi pertanian, pembangunan pedesaan, dan pembiayaan mikro.

FEB UNIB secara khusus dikenal melalui riset terapan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal serta perannya dalam mendorong kewirausahaan di komunitas pedesaan. Berbagai programnya secara konsisten menekankan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta fasilitasi inisiatif One Village One Product (OVOP) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah. Kemitraan fakultas ini dengan lembaga pemerintah dan mitra pembangunan turut memperkuat kontribusinya dalam dialog kebijakan regional, khususnya terkait pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Diskursus akademik lokal di Bengkulu banyak menyoroti ketiadaan transformasi ekonomi struktural. Meskipun tingkat kemiskinan mengalami perbaikan dalam satu dekade terakhir, banyak akademisi menilai bahwa perekonomian Bengkulu masih stagnan. Ketergantungan yang berkelanjutan terhadap sektor primer—khususnya pertanian—membatasi peluang kerja produktif di luar kegiatan subsisten. Para akademisi mencermati rendahnya tingkat pekerjaan formal dan dominasi pekerja informal sebagai indikator stagnasi pasar tenaga kerja. Kondisi ini diperparah oleh ketidaksesuaian antara output pendidikan vokasi dan permintaan tenaga kerja di sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi.

Beberapa peserta diskusi menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri dan diversifikasi ke sektor manufaktur dan jasa, yang didukung oleh investasi infrastruktur untuk meningkatkan akses pasar dan integrasi rantai pasok.

Isu pendidikan juga menjadi sorotan utama. Para akademisi mencatat bahwa meskipun angka partisipasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah meningkat, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Terdapat kesenjangan besar dalam hasil belajar antara sekolah di perkotaan dan perdesaan, terutama akibat kekurangan guru berkualitas dan fasilitas sekolah yang tidak memadai di wilayah terpencil. Ketimpangan kualitas pendidikan ini secara langsung berdampak pada kesenjangan kesempatan kerja dan pendapatan. Tanpa pembenahan terhadap kelemahan sistemik ini, program pelatihan vokasi diperkirakan tidak akan memberikan dampak berarti terhadap hasil pasar tenaga kerja.

Beberapa mahasiswa lokal juga menyuarakan keprihatinan atas terbatasnya peluang ekonomi bagi generasi muda, khususnya bagi lulusan sekolah vokasi. Mereka memandang tantangan ini bukan sekadar ketidakefisienan pasar tenaga kerja, tetapi juga sebagai kegagalan sistem dalam memenuhi kontrak sosial untuk menyediakan pekerjaan yang bermakna bagi warganya. Intervensi mereka mencerminkan keyakinan kuat terhadap potensi pembangunan ekonomi lokal—dengan catatan adanya dukungan kebijakan dan kepemimpinan yang tepat. Banyak di antara mereka menyerukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, di mana kaum muda diberdayakan sebagai agen perubahan, bukan sekadar penerima manfaat program pemerintah.

5.3. Temuan Utama: Tantangan Transformasi Struktural di Bengkulu

Diskusi dengan para pemangku kepentingan di Bengkulu mengidentifikasi tantangan utama dalam pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, yaitu minimnya transformasi struktural. Perekonomian Bengkulu masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, yang menyumbang sekitar 28–32% dari total PDRB provinsi, dengan komoditas utama berupa kelapa sawit, kopi, dan karet.

Dalam konteks negara berkembang, transformasi struktural umumnya ditandai dengan peralihan dari sektor pertanian ke sektor manufaktur untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja industri. Namun, di Bengkulu, penurunan kontribusi sektor pertanian justru diikuti oleh penyusutan sektor manufaktur. Hal ini memperburuk ketidaksesuaian keterampilan di pasar tenaga kerja dan berdampak langsung pada tingginya pengangguran di kalangan lulusan vokasi.

Transformasi struktural berpotensi mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan lulusan vokasi di Bengkulu. Ketika sektor industri berkembang, akan tercipta permintaan terhadap berbagai jenis keterampilan, khususnya yang sejalan dengan pelatihan vokasi. Perubahan ini dapat membuka jalur kerja yang lebih luas bagi lulusan vokasi yang selama ini terbatas pada ekonomi pertanian. Selain membuka peluang kerja baru, transformasi struktural juga mampu mendorong peningkatan produktivitas di sektor pertanian itu sendiri (Erumban & de Vries, 2024).

Meskipun dalam jangka panjang transformasi struktural dapat menurunkan ketimpangan (Morsy, Shimeles, & Nabassaga, 2023), dalam jangka pendek justru berisiko memperburuk ketimpangan (Roy & Roy, 2017; Vengadeshvaran, Saumik, & Guanghua, 2017). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa transformasi struktural dapat secara efektif mengurangi ketimpangan, diperlukan perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat Bengkulu. Perlindungan sosial berperan penting sebagai bantalan ekonomi, memberikan dukungan pendapatan serta memfasilitasi transisi tenaga kerja, sehingga masyarakat rentan tidak jatuh ke dalam kemiskinan selama masa penyesuaian ekonomi. Pendekatan kebijakan yang terintegrasi tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif, tetapi juga memastikan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses transformasi ekonomi.

5.4. Rekomendasi untuk Bengkulu: Mendorong Transformasi Struktural dan Penguatan Modal Manusia

Transformasi struktural di Bengkulu masih terbatas dan ketergantungan terhadap sektor primer telah menghambat diversifikasi ekonomi. Provinsi ini menghadapi ketidaksesuaian keterampilan di pasar tenaga kerja, terutama bagi lulusan vokasi, serta kemiskinan perdesaan yang berkepanjangan akibat rendahnya produktivitas sektor pertanian.

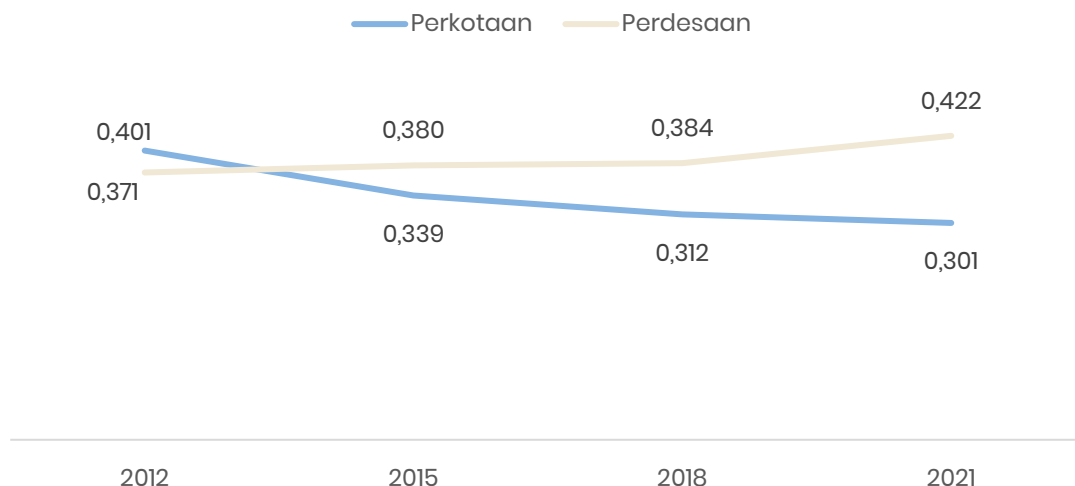
1. **Pengembangan Klaster Industri Agro dan Manufaktur Hijau**
Dorong pengembangan industri pengolahan agro berbasis komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, dan karet. Telusuri peluang investasi pada sektor manufaktur ramah lingkungan (green manufacturing) untuk menarik investasi berkelanjutan.
2. **Penguatan Keterkaitan antara Pelatihan Vokasi dan Ketenagakerjaan**
Bangun kemitraan yang kuat antara lembaga pelatihan vokasi, industri lokal, dan layanan ketenagakerjaan. Kembangkan program magang dan penempatan kerja yang menysasar pemuda dan lulusan vokasi.
3. **Modernisasi Pertanian dan Pertanian Cerdas Iklim (Climate-Smart Agriculture)**
Perluas adopsi teknik pertanian cerdas iklim, perbaiki sistem irigasi, dan tingkatkan akses terhadap pembiayaan pertanian. Prioritaskan pembangunan kapasitas bagi petani kecil.
4. **Perluasan Konektivitas Perdesaan dan Infrastruktur Digital**
Tingkatkan akses transportasi dan konektivitas digital di wilayah perdesaan untuk mendukung akses pasar bagi petani dan pelaku UMKM. Kembangkan program literasi digital agar masyarakat perdesaan dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital.
5. **Penguatan Mekanisme Perlindungan Sosial bagi Rumah Tangga Perdesaan**
Perluas cakupan dan efektivitas program bantuan sosial, termasuk asuransi kesehatan dan bantuan tunai bersyarat, untuk mengurangi kerentanan rumah tangga miskin di perdesaan, khususnya selama masa transisi ekonomi.

6. Kota Jayapura (Papua): Pengembangan Sumber Daya Manusia

6.1. Tinjauan Awal di Tingkat Regional

Provinsi Papua, yang terletak di bagian barat Pulau New Guinea, tetap menjadi salah satu wilayah yang paling terpinggirkan secara ekonomi dan sosial di Indonesia. Meskipun berbagai upaya pembangunan telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun provinsi—termasuk melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua—provinsi ini masih menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia. Menurut data BPS (2023), tingkat kemiskinan di Papua tercatat lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional, sementara indikator IPM tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi lainnya, mencerminkan kesenjangan yang masih mencolok dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Gambar 8. Koefisien Gini di Provinsi Papua



Sumber: SUSENAS, perhitungan penulis (2023)

6.1.1. Otonomi Khusus dan Dana Desa: Dampak Terbatas terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan

Sebagai upaya mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan, pemerintah telah mengalokasikan sumber daya fiskal yang signifikan ke Papua melalui Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Kementerian Keuangan (2024) mencatat bahwa alokasi dana ini secara umum meningkat dalam enam tahun terakhir, dengan tujuan mendukung pembangunan perdesaan dan mengatasi kesenjangan lama dalam akses terhadap layanan publik. Namun, temuan yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan diseminasi daerah di Jayapura menunjukkan bahwa efektivitas dana tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan masih terbatas.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Mesak (2024), seorang akademisi lokal yang turut serta dalam diseminasi, menemukan bahwa elastisitas Dana Desa terhadap pengurangan kemiskinan di Papua hanya sebesar $-0,1078$, sementara elastisitas Dana Otonomi Khusus bahkan lebih rendah, yaitu $-0,0259$. Artinya, setiap kenaikan dana sebesar 1% hanya mampu menurunkan kemiskinan kurang dari 0,1%, yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya fiskal yang belum efisien. Elastisitas dana tersebut dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga rendah: $0,0688$ untuk Dana Desa dan

hanya 0,0088 untuk Dana Otsus. Angka-angka ini menyoroti adanya inefisiensi sistemik dalam pengelolaan dan penggunaan dana, serta menunjukkan bahwa alokasi fiskal saja tidak cukup untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks di Papua.

Ketimpangan yang semakin melebar di wilayah perdesaan Papua, sebagaimana tercermin dari meningkatnya rasio Gini, memperkuat indikasi bahwa intervensi fiskal belum efektif. Meskipun terjadi peningkatan dana publik, kesenjangan dasar dalam akses infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi masih tetap terjadi, khususnya di wilayah terpencil seperti Papua Pegunungan.

6.1.2. Struktur Pasar Tenaga Kerja dan Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu permasalahan paling krusial di Papua adalah siklus terbatasnya peluang ekonomi yang berkelindan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Meskipun terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah di Papua masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Banyak anak, terutama di daerah pegunungan terpencil, putus sekolah dini karena tekanan ekonomi dan harus membantu keluarga melalui pekerjaan pertanian.

Pasar tenaga kerja di Papua menunjukkan pola yang kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah telah mendorong perluasan pendidikan kejuruan; di sisi lain, tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMA dan SMK tetap tinggi. Sementara itu, permintaan tenaga kerja justru terkonsentrasi di sektor-sektor yang tidak memerlukan pendidikan formal tinggi, terutama pertanian tradisional. Sektor pertanian di Papua masih bersifat padat karya dan berteknologi rendah, dengan adopsi mekanisasi dan praktik modern yang terbatas. Ketergantungan ini pada tenaga kerja tidak terampil membatasi diversifikasi ekonomi dan memperlambat pengembangan industri bernilai tambah lebih tinggi.

Masalah ini diperparah oleh kualitas pendidikan yang rendah. Banyak siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi masih mengalami kesulitan dalam keterampilan dasar literasi dan numerasi, yang menunjukkan lemahnya sistem pendidikan secara sistemik. Kekurangan guru berkualitas, infrastruktur sekolah yang tidak memadai, serta isolasi geografis turut memperparah kondisi ini. Sekolah-sekolah di wilayah seperti Papua Pegunungan sering kekurangan bahan ajar dan fasilitas dasar, sehingga sulit memberikan pendidikan yang berkualitas dan menutup kesenjangan pembelajaran.

6.1.3. Kendala Struktural dan Ketimpangan Spasial

Ketimpangan spasial tetap menjadi karakteristik utama dalam profil pembangunan Papua. Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi jauh lebih rendah di daerah perdesaan dan terpencil dibandingkan pusat kota seperti Jayapura. Data diagnosis menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga di perdesaan Papua yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan air minum bersih termasuk yang terendah di Indonesia. Perkembangan infrastruktur, termasuk konektivitas jalan dan jaringan komunikasi, berlangsung lambat dan tidak merata, sehingga semakin memarginalkan komunitas di daerah terpencil.

Meskipun aliran dana publik yang besar telah dikucurkan, berbagai kendala struktural menghambat pemerataan manfaat pembangunan. Tantangan implementasi, termasuk kapasitas terbatas di tingkat pemerintah daerah, lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi, serta persoalan tata kelola, telah menghambat efektivitas pelaksanaan program yang dibiayai oleh Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus. Korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan dana juga disebut sebagai faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya capaian dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan IPM (LPEM FEB UI, 2024).

6.2. Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Ketimpangan Regional di Papua

Di Papua, para pejabat pemerintah menyoroti ketergantungan yang terus berlangsung terhadap Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan. Meskipun transfer fiskal ini mencakup porsi signifikan dari anggaran daerah, para pejabat mengakui bahwa dana tersebut belum mampu menghasilkan perbaikan substansial dalam pengurangan kemiskinan maupun peningkatan kualitas pembangunan manusia. Beberapa pejabat mencatat bahwa tantangan administratif dan logistik di distrik-distrik terpencil menghambat penyampaian layanan secara efektif. Selain itu, mereka menyoroti keterbatasan kapasitas serap pemerintah daerah, termasuk kesulitan dalam perencanaan program, pemantauan, dan akuntabilitas.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perlunya peningkatan keselarasan antara program pembangunan lokal dengan kebutuhan masyarakat. Secara khusus, mereka menekankan pentingnya mengatasi keterputusan antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, yang selama ini menjadi hambatan bagi pengembangan sumber daya manusia di Papua. Sejalan dengan pandangan kalangan akademisi, para pejabat menyadari bahwa program pelatihan kejuruan sering kali gagal mencetak lulusan dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, mereka mendorong pendekatan yang lebih terintegrasi, yang menggabungkan reformasi sektor pendidikan dengan kebijakan pasar kerja yang bertujuan menciptakan peluang kerja berkelanjutan, terutama di sektor pertanian dan perikanan—dua sektor utama tempat sebagian besar angkatan kerja Papua berada.

Box 3. Universitas Cenderawasih

Universitas Cenderawasih (Uncen) merupakan perguruan tinggi negeri tertua dan paling bergengsi di Provinsi Papua. Didirikan pada tahun 1962 dan berlokasi di Jayapura, Uncen menjadi pusat utama pendidikan tinggi di Papua dan wilayah sekitarnya. Sebagai salah satu institusi kunci di Indonesia Timur, Uncen memainkan peran penting dalam memperluas akses pendidikan di wilayah yang ditandai oleh tantangan geografis dan sosial ekonomi yang kompleks.

Uncen memiliki lebih dari 15.000 mahasiswa dan menawarkan program akademik di berbagai bidang ilmu. Universitas ini dikenal atas komitmennya dalam menangani isu-isu spesifik Papua, termasuk hak-hak masyarakat adat, tata kelola lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Uncen juga aktif dalam berbagai program pengembangan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan komunitas adat.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cenderawasih merupakan salah satu aktor utama dalam pengembangan riset dan pendidikan ekonomi di Papua. FEB Uncen menyelenggarakan program sarjana dan pascasarjana di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Agenda akademik dan riset di fakultas ini berfokus pada tantangan ekonomi khas Papua, seperti rendahnya diversifikasi ekonomi, tingginya pengangguran di kalangan pemuda berpendidikan, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus.

FEB Uncen juga dikenal atas peran aktifnya dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya dalam mendorong penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat adat. Fakultas ini terlibat dalam berbagai studi terkait pembangunan perdesaan, pengelolaan dana desa, serta dampak sosial ekonomi dari desentralisasi fiskal di Papua. Melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, FEB Uncen telah memainkan peran strategis dalam perumusan kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan yang inklusif di wilayah ini.

Diskusi bersama para akademisi di Papua berfokus pada keterbatasan upaya pengembangan sumber daya manusia, meskipun telah dilakukan investasi publik yang signifikan melalui Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus. Akademisi menyampaikan data yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Papua masih jauh di bawah rata-rata nasional, terutama di wilayah terpencil. Tingginya angka putus sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah diidentifikasi sebagai permasalahan yang berkelanjutan, sering kali disebabkan oleh tekanan ekonomi rumah tangga dan keterbatasan akses terhadap sekolah. Para peserta menekankan bahwa peningkatan akses pendidikan harus disertai dengan intervensi yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran.

Selain itu, banyak lulusan sekolah kejuruan di Papua yang tidak berhasil memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kualifikasinya, mencerminkan ketidaksesuaian keterampilan yang cukup serius. Beberapa pembicara menyerukan perlunya peninjauan menyeluruh terhadap kurikulum pendidikan kejuruan agar lebih selaras dengan sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan di Papua, seperti pertanian berkelanjutan, perikanan, dan ekowisata.

Diskusi bersama mahasiswa mencerminkan pengalaman langsung mereka terhadap ketimpangan dalam pendidikan. Mahasiswa dari Jayapura dan Papua Pegunungan menyampaikan secara terbuka berbagai hambatan yang membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Meski demikian, terlihat jelas semangat optimisme dan tekad kuat di antara para peserta. Banyak yang menyuarakan bahwa pendidikan seharusnya menjadi kendaraan utama untuk memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan di Papua. Mereka berharap reformasi kebijakan pendidikan dapat membuka peluang bagi generasi muda asli Papua untuk berperan dalam profesi profesional dan kepemimpinan. Idealismenya disertai dengan kesiapan untuk terlibat dalam aspek teknis kebijakan pendidikan, termasuk relevansi kurikulum dan alokasi Dana Otsus.

6.3. Temuan Utama dari Papua

Di Provinsi Papua, siklus keterbatasan peluang ekonomi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terus melanggengkan ketimpangan. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMA dan SMK, sementara permintaan tenaga kerja justru lebih tinggi pada lulusan pendidikan dasar atau tidak berpendidikan formal sama sekali. Paradoks ini terutama didorong oleh dominasi sektor pertanian tradisional yang masih rendah teknologi dan belum banyak mengalami modernisasi.

Sebagian besar tenaga kerja di Papua berasal dari kelompok dengan pendidikan formal yang terbatas, yang membatasi potensi wilayah untuk mengadopsi teknologi dan mengembangkan industri bernilai tambah. Meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam dua dekade terakhir, rata-rata lama sekolah masih rendah, terutama di kalangan keluarga berpenghasilan rendah. Tekanan ekonomi memaksa banyak siswa, terutama di wilayah terpencil seperti Papua Pegunungan, untuk putus sekolah dan membantu keluarga di sektor pertanian. Hal ini diperparah oleh infrastruktur pendidikan yang tidak memadai dan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, sehingga mempersempit akses terhadap pendidikan yang bermutu. Bahkan di antara mereka yang berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, masih ditemukan tantangan dalam kemampuan literasi dan numerasi dasar, mencerminkan persoalan mendalam dalam sistem pendidikan di Papua.

Kondisi ini menggarisbawahi perlunya peninjauan ulang terhadap strategi pembangunan yang selama ini diterapkan di Papua. Meskipun Dana Desa dan Dana Otsus telah dikucurkan dalam jumlah besar, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan SDM masih belum optimal. Elastisitas yang rendah dari dana-dana tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran saja tidak cukup jika tidak disertai upaya mengatasi kendala struktural yang mendasar.

Untuk memutus siklus kemiskinan dan ketimpangan, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh—tidak hanya melalui peningkatan anggaran, tetapi juga dengan peningkatan efektivitas pemanfaatan dana. Hal ini mencakup intervensi yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, modernisasi praktik pertanian, dan pelatihan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja

saat ini. Selain itu, peningkatan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil serta perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan langkah krusial untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua. Tanpa upaya komprehensif tersebut, wilayah ini berisiko terus tertinggal dari bagian lain Indonesia dan melanggengkan siklus kemiskinan antar-generasi.

Upaya yang sedang berlangsung untuk mempercepat pembangunan di Papua melalui implementasi Dana Desa dan Dana Otsus belum menghasilkan dampak yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan atau meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Elastisitas yang rendah dari dana-dana ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi fiskal semata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan struktural yang telah mengakar. Ketertinggalan yang berkelanjutan dalam hal IPM, kemiskinan, dan ketimpangan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan saat ini. Diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan mendalam untuk mengatasi hambatan sistemik yang menghalangi kemajuan.

6.4. Rekomendasi untuk Papua: Memprioritaskan Pengembangan SDM dan Reformasi Tata Kelola

Papua masih menghadapi ketimpangan yang melekat akibat lemahnya indikator SDM dan tantangan dalam penyelenggaraan layanan publik. Meskipun telah menerima aliran dana Otsus dan Dana Desa dalam jumlah besar, capaian dalam hal pengurangan kemiskinan dan pembangunan manusia belum memadai.

1. **Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar**
Investasi perlu difokuskan pada rekrutmen, pelatihan, dan retensi guru, terutama di daerah terpencil dan pegunungan. Perluasan akses terhadap pendidikan anak usia dini dan pengurangan angka putus sekolah dapat didorong melalui program bantuan bersyarat dan pemberian makanan di sekolah.
2. **Realokasi Dana Otsus dan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan**
Membangun kerangka tata kelola yang transparan guna memastikan bahwa alokasi dana difokuskan pada proyek pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pertanian berkelanjutan.
3. **Mengembangkan Program Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan yang Kontekstual**
Pelatihan kejuruan perlu disesuaikan dengan peluang ekonomi lokal, seperti perikanan, ekowisata, dan pertanian berkelanjutan. Diperlukan pusat pelatihan regional yang bermitra dengan sektor swasta.
4. **Memperkuat Akses Layanan Kesehatan dan Intervensi Gizi**
Perluasan cakupan layanan kesehatan primer, program kesehatan ibu dan anak, serta intervensi gizi menjadi penting untuk menangani stunting dan tantangan kesehatan lainnya.
5. **Mendorong Tata Kelola Partisipatif dan Keterlibatan Masyarakat**
Merancang proses perencanaan partisipatif di tingkat desa dan kabupaten. Mendorong pelibatan masyarakat sipil dan komunitas adat dalam perencanaan anggaran dan pengawasan pelaksanaan program.
6. **Memperluas Konektivitas dan Infrastruktur Dasar di Wilayah Terpencil**
Mempercepat investasi dalam transportasi, akses air bersih, sanitasi, dan konektivitas digital guna meningkatkan akses terhadap layanan dan pasar bagi masyarakat di daerah terpencil.

7. Kota Samarinda (Kalimantan): Meningkatkan Penilaian atas Investasi Pembangunan

7.1. Tinjauan Awal di Tingkat Regional

Kalimantan Timur sering disebut sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia karena melimpahnya sumber daya alam, terutama batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Secara historis, provinsi ini memegang peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusinya di sektor ekstraktif, yang menurut BPS (2023) menyumbang lebih dari 50% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun PDRB per kapita Kalimantan Timur termasuk yang tertinggi di luar Jawa, kemakmuran ini belum berujung pada pemerataan kesejahteraan. Ketergantungan pada sektor ekstraktif yang padat modal menciptakan lapangan kerja yang terbatas bagi penduduk lokal, dan memunculkan dualisme ekonomi, di mana penciptaan kekayaan terkonsentrasi pada sektor sempit, sementara sebagian besar penduduk masih bergantung pada pekerjaan berupah rendah di sektor informal.

Kesenjangan sosial-ekonomi terlihat jelas antara pusat-pusat perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan dengan wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu dan Berau. Kawasan perkotaan menikmati infrastruktur yang lebih baik dan akses terhadap layanan serta peluang ekonomi, sementara komunitas perdesaan menghadapi keterbatasan layanan publik dan minimnya lapangan kerja produktif. Laporan Diagnostik Ketimpangan (LPEM FEB UI, 2024) mencatat bahwa akses terhadap sanitasi layak dan air minum bersih di perdesaan Kalimantan Timur jauh lebih rendah, terutama pada kelompok pendapatan terbawah. Ketimpangan spasial ini diperparah oleh lemahnya infrastruktur transportasi yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi, yang pada akhirnya mempertahankan siklus kemiskinan dan marginalisasi (World Bank, 2021).

7.1.1. Pembangunan IKN dan Implikasinya terhadap Ketimpangan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara—yang terletak di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara—diposisikan oleh pembuat kebijakan sebagai katalis untuk pemerataan pembangunan nasional dan diversifikasi ekonomi di luar Jawa (Perpres No. 63/2022). Proyek ini menjanjikan dampak transformatif bagi Kalimantan Timur, termasuk peningkatan infrastruktur, arus investasi baru, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, muncul kekhawatiran bahwa manfaat tersebut tidak terdistribusi secara merata dan dapat memperburuk ketimpangan yang sudah ada.

Dalam kegiatan diseminasi di Samarinda (LPEM FEB UI, 2024), para pemangku kepentingan menyoroti ketimpangan spasial dalam distribusi investasi dan layanan publik yang terkait dengan proyek IKN. Wilayah yang berdekatan dengan pusat IKN mulai menerima investasi yang ditargetkan, sementara daerah lain, khususnya yang jauh dari koridor pembangunan, tetap terpinggirkan. Pola ini mengulang kecenderungan proyek infrastruktur besar sebelumnya di Indonesia, di mana wilayah perifer tidak memperoleh limpahan ekonomi secara signifikan (Booth, 2016).

Kedatangan penduduk dan tenaga kerja baru ke Samarinda dan Balikpapan turut menambah tekanan terhadap perumahan, transportasi, dan layanan publik. Kementerian PUPR (2024) mencatat kenaikan harga tanah dan hunian, yang mendorong penggusuran kelompok berpenghasilan rendah dan meningkatkan risiko tumbuhnya permukiman informal tanpa perencanaan yang memadai. Spekulasi tanah menjadi isu yang semakin menonjol, terutama di sekitar kawasan IKN, dan telah memicu konflik agraria, termasuk yang melibatkan masyarakat adat (AMAN, 2023).

7.1.2. Dinamika Pasar Tenaga Kerja dan Ketimpangan dalam Ketenagakerjaan

Pasar tenaga kerja Kalimantan Timur yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang inklusif. Menurut Sakernas (2023), pekerjaan formal di provinsi ini terkonsentrasi pada posisi berkeahlian tinggi yang terkait dengan industri ekstraktif dan proyek infrastruktur besar. Sementara itu, sekitar 58% angkatan kerja masih berada di sektor informal—salah satu proporsi tertinggi di antara provinsi kaya sumber daya. Perempuan dan pemuda mendominasi pekerjaan informal, termasuk perdagangan kecil, pertanian, dan pekerjaan domestik, dengan akses terbatas terhadap perlindungan sosial (BPS, 2023).

Pembangunan IKN berpotensi memperdalam segmentasi pasar tenaga kerja. Sebagian besar pekerjaan yang tercipta bersifat teknis dan memerlukan keterampilan tinggi di sektor konstruksi, teknik, dan jasa, yang sering kali menarik tenaga kerja migran dari luar Kalimantan Timur. Hal ini dapat meminggirkan pekerja lokal yang keterampilannya tidak sesuai dengan permintaan IKN. Laporan Diagnostik Ketimpangan mencatat bahwa lulusan kejuruan di Samarinda masih mengalami tingkat pengangguran yang tinggi akibat ketidaksesuaian keterampilan. Kurangnya program peningkatan keterampilan dan keterlibatan industri dalam desain kurikulum memperparah masalah ini (LPEM FEB UI, 2024).

Persaingan untuk pekerjaan berkeahlian rendah juga semakin ketat, khususnya di sektor konstruksi informal dan jasa, yang umumnya memiliki kondisi kerja yang buruk dan upah rendah. Tanpa intervensi yang memadai, ekspansi sektor informal berisiko memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi dan menghambat prospek pembangunan yang inklusif.

7.1.3. Ketimpangan Spasial dalam Akses terhadap Layanan Publik

Meskipun Kalimantan Timur termasuk provinsi dengan pendapatan per kapita tinggi, kualitas layanan publik masih menunjukkan disparitas regional yang tajam. World Bank (2021) mencatat bahwa indikator kesehatan dan pendidikan di daerah perdesaan Kalimantan Timur setara dengan provinsi-provinsi termiskin di Indonesia. Akses terhadap layanan kesehatan dasar di wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu masih terbatas, dengan banyak desa bergantung pada Puskesmas tanpa kehadiran dokter dan harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai rumah sakit (Kementerian Kesehatan, 2023).

Disparitas serupa terlihat pada sektor pendidikan. Sekolah di perdesaan kekurangan guru berkualifikasi dan menghadapi rasio siswa-guru yang tinggi. Tingkat putus sekolah tetap tinggi, terutama di jenjang menengah atas, karena siswa dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali harus bekerja lebih awal. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antar-generasi dan membatasi mobilitas sosial, terutama bagi komunitas adat dan daerah terpencil.

7.1.4. Risiko Lingkungan dan Sosial dari Pembangunan IKN

Konsekuensi lingkungan dari pembangunan IKN menjadi perhatian besar. Kalimantan Timur merupakan rumah bagi hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi, dan pembukaan lahan skala besar yang terkait dengan proyek IKN mengancam habitat penting serta meningkatkan risiko perubahan iklim akibat deforestasi (WWF Indonesia, 2023). Degradasi lingkungan ini secara tidak proporsional berdampak pada masyarakat adat, yang bergantung pada hutan, sungai, dan lahan pertanian untuk penghidupan mereka.

Laporan AMAN (2023) dan Walhi (2023) menunjukkan bahwa pengakuan hak atas tanah adat masih lemah dalam konteks pembangunan IKN. Terdapat laporan penggusuran paksa dan kompensasi yang tidak memadai, yang memicu ketegangan dan potensi konflik. Tanpa tata kelola lingkungan yang lebih kuat dan pendekatan pengelolaan lahan yang inklusif, kesenjangan sosial ekonomi antara penerima manfaat IKN dan mereka yang terdampak negatif akan semakin melebar.

7.2. Perspektif Pemangku Kepentingan tentang Ketimpangan Regional di Kalimantan

Di Kalimantan Timur, diskusi pemangku kepentingan sangat dipengaruhi oleh pembangunan IKN dan dampak sosial-ekonominya. Pejabat pemerintah menjelaskan berbagai upaya persiapan menghadapi arus investasi dan migrasi penduduk sebagai dampak dari pemindahan ibu kota. Salah satu inisiatif utama adalah penyusunan Sanitation Roadmap, yang bertujuan meningkatkan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi di sekitar kawasan IKN. Langkah ini dianggap penting untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan mengurangi risiko ekspansi permukiman informal.

Namun, sejumlah pejabat menyuarakan kekhawatiran terhadap distribusi peluang ekonomi yang tidak merata dari proyek IKN. Sementara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menerima arus investasi yang besar, daerah lain—khususnya yang jauh dari pusat IKN—masih terpinggirkan dari narasi pertumbuhan provinsi. Para pejabat juga menyoroti peningkatan pengangguran di kalangan usia produktif, terutama pemuda, karena penciptaan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja di wilayah yang tidak terhubung langsung dengan pembangunan IKN.

Para pemangku kepentingan menekankan perlunya kajian lebih lanjut terkait dampak sosial ekonomi pembangunan IKN, khususnya pada dinamika pasar tenaga kerja, keterjangkauan perumahan, dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa peserta mengusulkan kemitraan dengan universitas dan lembaga kajian, termasuk LPEM FEB UI, untuk melakukan penilaian dampak dan merumuskan rekomendasi kebijakan guna memastikan hasil pembangunan yang lebih inklusif. Mereka juga menyoroti pentingnya mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa investasi infrastruktur terdistribusi secara adil dan layanan sosial diperluas untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah di kota-kota sekunder seperti Samarinda dan Balikpapan.

Dari kalangan akademisi, kekhawatiran utama terletak pada potensi ketimpangan sosial ekonomi akibat pembangunan IKN. Meski mengakui potensi pertumbuhan ekonomi, mereka menekankan risiko distribusi manfaat yang tidak merata. Mereka menunjukkan adanya gejala awal meningkatnya ketimpangan, karena wilayah di sekitar IKN lebih dulu memperoleh manfaat dari investasi dan infrastruktur. Para akademisi mendorong kebijakan ekonomi regional yang lebih inklusif, termasuk mekanisme untuk mendukung UMKM di luar wilayah inti IKN.

Dalam sektor pendidikan, para akademisi menyuarakan keprihatinan bahwa sistem pendidikan Kalimantan Timur belum cukup mempersiapkan penduduknya untuk terlibat dalam peluang yang tercipta dari pembangunan IKN. Meski memiliki PDRB per kapita yang tinggi, provinsi ini masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, terutama di wilayah perdesaan. Mereka merekomendasikan agar program pendidikan kejuruan dan teknis diarahkan pada sektor-sektor yang diperkirakan tumbuh akibat pembangunan IKN, seperti konstruksi, layanan digital, dan manajemen lingkungan. Koordinasi yang lebih baik antara dunia pendidikan dan industri juga dianggap penting agar program pelatihan selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Box 4. Universitas Mulawarman

Universitas Mulawarman (Unmul) merupakan perguruan tinggi negeri terbesar dan tertua di Provinsi Kalimantan Timur. Didirikan pada tahun 1962 dan berlokasi di Samarinda, Unmul berperan sebagai institusi pendidikan tinggi utama di Kalimantan. Letaknya yang strategis serta cakupan keilmuan yang luas menjadikan Unmul sebagai kontributor penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan riset regional di salah satu wilayah terkaya sumber daya alam di Indonesia.

Unmul memiliki lebih dari 30.000 mahasiswa yang tersebar di 14 fakultas dengan berbagai program studi. Seiring dengan persiapan Kalimantan Timur menjadi tuan rumah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Universitas Mulawarman berada di garda depan dalam riset-riset mengenai pembangunan perkotaan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan transformasi ekonomi regional. Fokus Unmul pada isu keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat mencerminkan komitmennya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan secara adil dan merata di seluruh wilayah provinsi.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman memainkan peran penting dalam mendorong penguasaan keilmuan ekonomi dan riset kebijakan yang relevan dengan arah pembangunan Kalimantan Timur. FEB Unmul menyelenggarakan program studi di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi, dengan penekanan khusus pada ekonomi sumber daya, pembangunan daerah, dan keuangan publik.

FEB Unmul memiliki kontribusi signifikan dalam menganalisis dampak sosial ekonomi dari pemindahan IKN, termasuk dinamika pasar tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola pertanahan. Berbagai kajian yang dilakukan telah menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah terkait pengembangan tenaga kerja dan strategi investasi, guna memastikan bahwa masyarakat lokal turut memperoleh manfaat dari transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Kolaborasi fakultas ini dengan mitra pembangunan dan pemangku kepentingan sektor swasta juga memperkuat kapasitasnya dalam memberi masukan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif di Kalimantan Timur.

Di Kalimantan Timur, diskusi mahasiswa banyak berfokus pada potensi dan risiko dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mahasiswa di Samarinda menyampaikan kekhawatiran bahwa arus investasi dan migrasi penduduk yang menyertai proyek ini dapat memperdalam ketimpangan yang sudah ada jika tidak dikelola dengan hati-hati. Meski demikian, mereka tetap optimistis bahwa IKN dapat menjadi katalisator pertumbuhan inklusif—dengan catatan bahwa masyarakat lokal, termasuk kalangan muda, diberikan ruang partisipasi yang nyata dalam proses pengambilan keputusan. Optimisme ini tercermin dalam berbagai usulan inisiatif yang dipimpin oleh pemuda, seperti pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja baru, kewirausahaan sosial, dan program pelestarian lingkungan berbasis komunitas.

7.3. Temuan Utama dari Kalimantan Timur

Minimnya dampak nyata proyek IKN di wilayah seperti Kabupaten Paser dan sekitarnya menunjukkan bahwa pembangunan di Kalimantan Timur masih bersifat tidak merata. Fokus pengembangan yang terpusat di sekitar kawasan inti IKN telah membuat wilayah pinggiran tertinggal dari sisi infrastruktur dan layanan dasar. Ketimpangan diperburuk oleh masuknya tenaga kerja dari luar provinsi, khususnya dari Makassar dan Pulau Jawa, yang mengisi sebagian besar lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya, banyak tenaga kerja lokal justru mencari pekerjaan di luar Kalimantan Timur karena merasa tidak mendapatkan peluang yang setara. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan strategi kebijakan pemerintah agar proyek-proyek besar seperti IKN juga menjadi sarana pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal perlu menjadi prioritas untuk memastikan bahwa penduduk Kalimantan Timur dapat bersaing secara adil dengan pekerja dari luar daerah, serta untuk menjamin bahwa manfaat pembangunan tersebar secara lebih merata di seluruh provinsi.

Infrastruktur jalan merupakan komponen kunci dalam pertumbuhan ekonomi karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas orang dan barang. Oleh karena itu, pengembangan transportasi jalan menjadi prioritas utama di Kalimantan Timur (Wahidah et al., 2024). Namun, provinsi ini masih menghadapi tantangan besar dalam pengembangan jaringan jalan yang berdampak pada pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan.

Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang buruk sering kali harus melalui jalur panjang seperti perwakilan legislatif daerah, yang belum tentu efektif dalam menyelesaikan masalah. Meskipun alokasi anggaran daerah (APBD) untuk pembangunan jalan cukup besar, khususnya di Samarinda, ekspansi jaringan jalan mengalami stagnasi dalam dua tahun terakhir. Luasnya wilayah geografis dan tantangan logistik menjadi kendala utama, sehingga alokasi anggaran besar pun belum menghasilkan peningkatan infrastruktur yang signifikan.

Di luar tantangan infrastruktur, kehadiran IKN juga memunculkan implikasi lebih lanjut terhadap ketimpangan regional. Place-based policy—kebijakan berbasis wilayah untuk mendorong kinerja ekonomi daerah tertentu melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan upah—perlu dievaluasi secara cermat dalam konteks IKN (Neumark & Simpson, 2015). Sementara kebijakan semacam ini dapat memperkuat pertumbuhan wilayah yang sudah berkembang, literatur memperingatkan bahwa kebijakan tersebut juga dapat membawa dampak negatif yang kompleks (Lang et al., 2022). Oleh karena itu, analisis mendalam diperlukan untuk memahami sejauh mana keberadaan IKN dapat memperburuk ketimpangan di Kalimantan Timur dan untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan, jadwal diseminasi mengalami beberapa penyesuaian. Awalnya, kegiatan pertama direncanakan pada minggu ketiga bulan Juni. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan terakhir di Samarinda, sesi kedua yang semula dijadwalkan di kampus universitas dibatalkan karena benturan jadwal dengan pejabat kampus. Sebagai alternatif, tim berhasil memperoleh ruang pertemuan eksternal dan mengundang mahasiswa untuk hadir dalam sesi lanjutan di lokasi tersebut.

7.4. Kalimantan Timur: Memanfaatkan Proyek IKN untuk Pembangunan Regional yang Inklusif

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membawa peluang sekaligus tantangan bagi Kalimantan Timur. Meski proyek ini menjanjikan pertumbuhan ekonomi, terdapat risiko eksklusi terhadap komunitas yang berada di luar zona pembangunan. Untuk memastikan pembangunan yang inklusif, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal:

1. **Tetapkan Kuota Tenaga Kerja Lokal untuk Proyek IKN**
Wajibkan para pengembang dan kontraktor yang terlibat dalam proyek IKN untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam jumlah minimum agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh penduduk setempat.
2. **Perluas dan Modernisasi Fasilitas Pelatihan Kerja (BLK)**
Bangun dan perbarui Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh provinsi, dengan kurikulum yang berfokus pada sektor konstruksi, keterampilan digital, pengelolaan lingkungan, dan energi terbarukan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan IKN.
3. **Tingkatkan Infrastruktur dan Akses Layanan di Wilayah Periferal**
Prioritaskan investasi infrastruktur untuk konektivitas jalan, akses air bersih, sanitasi, dan listrik di wilayah-wilayah di luar zona inti IKN, khususnya di komunitas adat dan daerah tertinggal.

4. Dorong Perencanaan Tata Ruang yang Inklusif dan Tata Kelola Pertanahan yang Adil
Kembangkan kerangka perencanaan spasial yang mencegah penggusuran dan konflik lahan, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah masyarakat adat. Perkuat sistem registrasi tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa.
5. Tetapkan Standar Lingkungan dan Program Keberlanjutan
Terapkan standar lingkungan yang ketat serta sistem pemantauan terhadap pembangunan IKN. Promosikan kegiatan konservasi, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas.
6. Dukung UMKM dan Kewirausahaan Lokal
Sediakan pembiayaan dan pelatihan yang ditargetkan untuk UMKM, khususnya di sektor jasa pendukung pembangunan IKN, termasuk perhotelan, perdagangan, dan logistik.

8. Tantangan dan Pelajaran dari Kegiatan Diseminasi: Perspektif yang Beragam

8.1. Membingkai Ketimpangan sebagai Narasi Sosial

Kegiatan diseminasi regional telah menjadi platform penting untuk mengumpulkan beragam perspektif dari berbagai kelompok pemangku kepentingan terkait isu ketimpangan di Indonesia. Meskipun terdapat kesepakatan umum di antara pejabat pemerintah, akademisi, dan mahasiswa mengenai relevansi dan urgensi penanganan ketimpangan, diskusi mengungkapkan perbedaan penting dalam penekanan, interpretasi, dan solusi yang diusulkan. Perbedaan perspektif ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana aktor-aktor berbeda memahami dan merespons tantangan pengurangan ketimpangan di tingkat sub-nasional.

Lebih dari sekadar menyampaikan data dan statistik, kegiatan diseminasi juga menampilkan bagaimana ketimpangan dipersepsi, ditafsirkan, dan diperdebatkan oleh para aktor lokal. Para pemangku kepentingan tidak menerima hasil temuan sebagai diagnosis yang statis, melainkan meresponsnya dengan refleksi, kritik, dan seruan untuk bertindak—yang mencerminkan pengalaman nyata tentang marginalisasi dan pembangunan yang tidak merata. Di beberapa kota, khususnya Jayapura dan Palu, diskusi berkembang hingga menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar mengenai keadilan, representasi, dan suara.

Satu titik temu yang muncul adalah pengakuan bersama bahwa ketimpangan di Indonesia bersifat multidimensi, tidak hanya terkait dengan kesenjangan pendapatan tetapi juga mencakup ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan peluang kerja. Namun demikian, kelompok pemangku kepentingan berbeda dalam hal penilaian terhadap akar permasalahan dan respons kebijakan yang tepat.

Hal ini menunjukkan bahwa diagnosis ketimpangan tidak hanya berfungsi sebagai alat analitis, tetapi juga sebagai instrumen politik—kerangka kerja yang tidak hanya menggambarkan kesenjangan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mendiskusikan sejauh mana ketimpangan dapat diterima, dan apa yang harus dilakukan untuk mengubahnya. Dengan demikian, diagnosis ini memiliki potensi untuk memicu dialog kebijakan dan keterlibatan masyarakat di tingkat nasional maupun daerah.

8.2. Pejabat Pemerintah: Berorientasi pada Kebijakan dan Pragmatis

Pejabat pemerintah yang berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi umumnya mendekati isu ketimpangan dari sudut pandang implementasi kebijakan. Mereka menunjukkan minat yang jelas dalam mengeksplorasi bagaimana temuan dari Laporan Diagnostik Ketimpangan dapat digunakan untuk memperkuat kerangka kebijakan yang ada. Di Bengkulu dan Kalimantan Timur, misalnya, para pejabat menyoroti inisiatif yang sedang berjalan seperti program One Village, One Product (OVOP) dan One Company, One Person (OCOP), serta rencana pengembangan infrastruktur seperti Sanitation Roadmap.

Meskipun mereka optimis terhadap potensi program-program tersebut, para pejabat juga mengakui adanya tantangan implementasi yang signifikan, termasuk keterbatasan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor yang lemah, dan keterbatasan fiskal di tingkat daerah. Banyak dari mereka memandang ketimpangan melalui lensa pembangunan regional dan desentralisasi fiskal, dan menyuarakan kekhawatiran bahwa transfer fiskal yang besar belum selalu menghasilkan pembangunan yang adil. Hal ini tampak menonjol dalam diskusi terkait Papua dan Kalimantan Timur, di mana efektivitas dan penargetan Dana Desa serta Dana Otonomi Khusus dipertanyakan.

Alih-alih mengusulkan pendekatan kebijakan baru, pejabat pemerintah cenderung menekankan upaya pragmatis untuk meningkatkan efektivitas program yang sudah ada. Tiga area prioritas yang mereka identifikasi untuk dukungan riset ke depan meliputi:

1. Evaluasi dampak sosial ekonomi dari pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pasca-bencana dan kawasan pertumbuhan baru.
2. Penilaian efektivitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mengatasi pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan.
3. Analisis implikasi desentralisasi fiskal terhadap penyediaan layanan dan pengurangan ketimpangan di tingkat lokal.

Selain itu, pejabat pemerintah secara konsisten menekankan pentingnya penguatan sistem data dan peningkatan kualitas kerangka pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mereka menilai bahwa tanpa data yang akurat dan kapasitas analisis yang memadai, perancangan dan implementasi strategi pengurangan ketimpangan akan tetap menjadi tantangan besar..

8.3. Akademisi: Struktural dan Analitis

Berbeda dengan pendekatan pejabat pemerintah, kalangan akademisi cenderung membingkai ketimpangan sebagai persoalan struktural yang membutuhkan solusi sistemik jangka panjang. Mereka menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan diversifikasi ekonomi sebagai kunci pengurangan ketimpangan. Akademisi secara kritis menyoroti kebijakan berbasis wilayah (*place-based policies*) yang terlalu berfokus pada infrastruktur fisik tanpa disertai investasi sosial yang seimbang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Di Kalimantan Timur, misalnya, akademisi menyampaikan kekhawatiran bahwa fokus berlebihan pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat memperdalam ketimpangan spasial jika tidak dibarengi dengan kebijakan pendukung untuk memastikan manfaat tersebar di luar kawasan inti ibu kota.

Para akademisi juga menekankan pentingnya mengatasi segmentasi pasar tenaga kerja, khususnya ketidaksesuaian antara pendidikan vokasi dan kebutuhan riil pasar kerja lokal. Isu ini diangkat di hampir semua provinsi, di mana lulusan pendidikan kejuruan kerap menghadapi tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan lulusan pendidikan umum. Beberapa akademisi merekomendasikan tinjauan menyeluruh terhadap kurikulum pelatihan vokasi agar lebih selaras dengan sektor ekonomi yang sedang berkembang, serta peningkatan kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha.

Lebih jauh, akademisi mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti yang ditopang oleh analisis data yang kuat. Mereka menyoroti perlunya penguatan sistem pengumpulan data dan pemantauan di tingkat subnasional untuk memungkinkan pengukuran ketimpangan dan efektivitas program yang lebih akurat.

8.4. Mahasiswa: Normatif dan Idealistik

Mahasiswa membawa energi dan perspektif yang berbeda dalam diskusi. Keterlibatan mereka didorong oleh komitmen normatif terhadap keadilan sosial dan keyakinan akan kemungkinan terjadinya perubahan transformatif. Mahasiswa sering kali mengutip pengalaman pribadi dan observasi di komunitas mereka untuk menggambarkan dampak nyata dari ketimpangan, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Di Papua dan Sulawesi Tengah, banyak mahasiswa menyampaikan secara langsung hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan dasar, serta rasa frustrasi terhadap respons pemerintah yang dianggap tidak memadai.

Meskipun idealistik, banyak mahasiswa juga menunjukkan ketertarikan yang meningkat terhadap aspek teknis dari analisis ketimpangan. Mereka mengajukan pertanyaan kritis tentang sumber data, metodologi indikator, dan interpretasi temuan diagnosis. Di beberapa provinsi, mahasiswa menyatakan minat untuk melakukan riset mandiri terkait ketimpangan sebagai bagian dari studi

akademik mereka—menunjukkan munculnya generasi baru peneliti dan advokat kebijakan yang potensial.

8.5. Tema Lintas Kelompok: Ketenagakerjaan dan Infrastruktur

Dua tema besar yang konsisten muncul dalam hampir semua diskusi lintas kelompok adalah: tantangan pasar tenaga kerja dan pengembangan infrastruktur. Isu pengangguran vokasi menjadi perhatian utama. Para pemangku kepentingan mencatat bahwa banyak provinsi mengalami tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan lulusan SMK, meskipun investasi pada pendidikan vokasi terus meningkat. Ketidaksesuaian antara pelatihan keterampilan dan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan, terutama karena generasi muda—terutama dari latar belakang ekonomi lemah—kesulitan memperoleh pekerjaan formal yang stabil.

Tema kedua adalah pembangunan infrastruktur fisik. Walaupun sebagian besar pemangku kepentingan sepakat bahwa investasi infrastruktur penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah, terdapat perbedaan pandangan mengenai dampaknya terhadap ketimpangan. Pejabat pemerintah sering kali menyebut infrastruktur sebagai pilar utama strategi pembangunan regional, dengan merujuk pada proyek jalan tol, pelabuhan, bandara, dan IKN sebagai penggerak peluang ekonomi. Sementara itu, akademisi dan mahasiswa mengingatkan bahwa pembangunan berbasis infrastruktur dapat memperburuk ketimpangan spasial jika tidak disertai dengan perencanaan inklusif dan program sosial yang terarah.

Di Kalimantan Timur, misalnya, muncul kekhawatiran bahwa proyek infrastruktur yang terkait dengan IKN lebih banyak menguntungkan wilayah sekitar ibu kota, sementara daerah pedesaan dan terpencil tetap tertinggal. Observasi serupa juga muncul di Sulawesi Tengah, di mana proses rekonstruksi pascabencana lebih terfokus pada wilayah perkotaan seperti Palu, sementara kabupaten pedesaan mengalami pemulihan yang lebih lambat.

9. Kesimpulan dan Pelajaran Utama

Laporan Inequality Diagnostic untuk Indonesia menyajikan analisis mendalam mengenai sifat ketimpangan yang kompleks dan persisten di negara ini. Meskipun secara agregat terdapat perbaikan dalam ketimpangan pendapatan di tingkat nasional, kesenjangan antarprovinsi tetap mencolok, mencerminkan perbedaan struktural dan kontekstual yang telah lama mengakar.

Divergensi ini tampak jelas di empat provinsi yang menjadi lokasi diseminasi regional, yaitu Sulawesi Tengah, Bengkulu, Papua, dan Kalimantan Timur, yang masing-masing menghadapi tantangan pembangunan yang unik. Laporan ini menyoroti bagaimana berbagai faktor, seperti paparan terhadap bencana alam, pembangunan infrastruktur yang timpang, lemahnya kualitas sumber daya manusia, dan alokasi sumber daya fiskal yang belum efektif, telah berkontribusi terhadap ketimpangan regional yang berkelanjutan.

9.1. Menjembatani Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan yang Terarah

Ketimpangan geografis masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan Indonesia, ditandai dengan kesenjangan signifikan dalam akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar antara Pulau Jawa dan wilayah luar Jawa. Strategi jangka panjang perlu difokuskan pada pembangunan regional yang terarah, dengan prioritas pada investasi infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal, khususnya di Indonesia Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.

Mekanisme transfer fiskal, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu dioptimalkan untuk memastikan distribusi dana pembangunan yang lebih adil. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dana tersebut secara efektif dan transparan sangat penting untuk mengurangi ketimpangan spasial dan mendorong pertumbuhan regional yang inklusif.

Temuan laporan ini menegaskan perlunya strategi yang lebih spesifik dan multidimensi, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal. Upaya pengurangan ketimpangan tidak dapat bergantung pada redistribusi pendapatan semata, melainkan harus mencakup perbaikan pada faktor-faktor struktural dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

Rekomendasi strategis yang telah dirinci untuk masing-masing provinsi dalam bagian sebelumnya menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil. Strategi pengurangan ketimpangan yang efektif harus melampaui bantuan jangka pendek, dan lebih berfokus pada pembentukan sistem pembangunan yang inklusif, tangguh, partisipatif, dan berkelanjutan.

Ke depan, pelajaran dari kajian ini dapat menjadi dasar bagi riset yang lebih terarah, perumusan kebijakan yang lebih baik, serta koordinasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan. Dengan mengatasi akar penyebab ketimpangan, Indonesia dapat membangun jalur pembangunan yang lebih inklusif, memastikan bahwa tidak ada wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal.

9.2. Rekomendasi Strategis bagi Mitra Pembangunan: Memaksimalkan Dampak ke Depan

Laporan Inequality Diagnostic untuk Indonesia menegaskan bahwa ketimpangan antarwilayah bersifat persisten dan multidimensi, sebagaimana terlihat jelas di provinsi-provinsi seperti Sulawesi Tengah, Bengkulu, Papua, dan Kalimantan Timur. Meskipun indikator nasional menunjukkan adanya perbaikan dalam ketimpangan pendapatan, ketimpangan regional tetap signifikan karena tantangan struktural, kerentanan terhadap bencana, pembangunan infrastruktur yang timpang, dan alokasi fiskal yang belum efisien. Untuk mengatasi persoalan yang kompleks dan sangat kontekstual ini, diperlukan aksi kolaboratif, di mana mitra pembangunan memiliki peran penting dalam mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi ketimpangan.

Mitra pembangunan memiliki posisi strategis untuk memberikan kontribusi melalui asistensi teknis, penguatan kapasitas, advokasi kebijakan, dan pendanaan strategis. Pelajaran dari kegiatan diseminasi regional serta temuan laporan ini mengindikasikan beberapa area prioritas di mana intervensi mitra pembangunan dapat diperkuat untuk mendukung strategi pembangunan yang efektif dan inklusif.

Salah satu peluang awal untuk keterlibatan mitra pembangunan adalah penguatan kerja sama teknis dengan institusi lokal. Selama kegiatan diseminasi, berbagai tantangan logistik dan administratif teridentifikasi—terutama dalam mobilisasi peserta dan pengelolaan acara di wilayah terpencil. Kemitraan dengan universitas dan pusat riset lokal merupakan cara yang efektif untuk menjawab tantangan ini, karena institusi lokal memiliki pemahaman kontekstual dan jejaring administratif yang lebih kuat. Mitra pembangunan dapat memfasilitasi dan mendanai kesepakatan kerja sama teknis antara lembaga nasional seperti LPEM FEB UI dengan universitas di provinsi-provinsi tempat diseminasi dilakukan. Kemitraan ini juga dapat mendukung produksi riset yang bersifat regional, melengkapi analisis diagnostik nasional.

Prioritas lain adalah mendukung pembaruan dan perluasan cakupan laporan Inequality Diagnostic, dengan memanfaatkan dataset terbaru, termasuk data tahun 2023. Para pemangku kepentingan menyampaikan kebutuhan yang jelas akan analisis yang terkini dan kontekstual. Mitra pembangunan dapat memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk memperbarui laporan agar tetap relevan dan kredibel sebagai alat perumusan kebijakan. Selain pembaruan data, ada kebutuhan untuk memperluas cakupan tematik laporan, berdasarkan masukan dari kegiatan diseminasi. Beberapa dimensi penting yang direkomendasikan untuk integrasi ke dalam kajian mendatang antara lain:

1. Ketimpangan Energi: termasuk akses rumah tangga terhadap bahan bakar konvensional dan teknologi energi terbarukan di wilayah tertinggal.
2. Akses dan Penggunaan Digital: mencakup tidak hanya konektivitas, tetapi juga literasi digital, penggunaan internet, dan keterjangkauan.
3. Ketimpangan Tenaga Kerja dalam Transisi Hijau: fokus pada akses terhadap pekerjaan hijau dan pelatihan vokasi di sektor energi terbarukan dan industri berkelanjutan.
4. Evaluasi Dampak Kebijakan Kunci: khususnya Dana Desa, untuk menilai efektivitasnya dalam mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan lokal yang inklusif.
5. Ketimpangan Kualitas Balai Latihan Kerja (BLK): termasuk variasi dalam mutu layanan dan hasil pelatihan antarwilayah.
6. Ketimpangan Akses Infrastruktur Transportasi: mencakup kesenjangan regional dalam konektivitas dan akses terhadap peluang ekonomi melalui jalan, pelabuhan, dan transportasi publik.

Usulan perluasan ini sejalan dengan Sustainable Development Goal (SDG) 10, yang mendorong pengurangan ketimpangan di dalam dan antar negara. Dukungan terhadap kajian yang lebih komprehensif dan perancangan kebijakan berbasis bukti akan secara langsung berkontribusi pada pencapaian target SDG 10—termasuk peningkatan pendapatan kelompok 40% terbawah, promosi inklusi sosial dan ekonomi, serta pemberian kesempatan yang setara melalui kebijakan yang adil dan partisipatif.

Selain mendukung riset dan kajian, mitra pembangunan dapat memainkan peran penting dalam mendorong kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas di tingkat subnasional. Temuan laporan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam koordinasi kebijakan lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten. Banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam manajemen data, desain kebijakan, dan pelaksanaan program. Mitra pembangunan dapat menyediakan bantuan teknis dan pelatihan yang ditargetkan, termasuk dalam bidang perencanaan partisipatif, pemantauan dan evaluasi (M&E), serta tata kelola keuangan publik. Peningkatan kapasitas

di bidang ini akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan dan mengoptimalkan hasil dari program yang sudah ada.

Mitra pembangunan juga diharapkan mendukung replikasi dan perluasan proyek percontohan (pilot) yang menawarkan solusi kontekstual terhadap ketimpangan wilayah. Inisiatif ini dapat menjadi laboratorium untuk menguji pendekatan-pendekatan inovatif yang merespons langsung akar penyebab ketimpangan lokal. Misalnya:

Di Sulawesi Tengah, mendukung program pemulihan mata pencaharian pascabencana dengan pendekatan cash-for-work yang terintegrasi dengan pelatihan vokasi.

Di Bengkulu, mendukung pengembangan klaster agroindustri untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja pedesaan.

Di Papua, mendanai program pendidikan berbasis komunitas, termasuk platform pembelajaran digital untuk daerah terpencil.

Di Kalimantan Timur, mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan yang terhubung dengan relokasi IKN, agar manfaatnya menjangkau komunitas pedesaan dan adat.

Promosi tata kelola yang inklusif dan partisipatif juga merupakan area penting yang perlu didukung. Pengurangan ketimpangan menuntut sistem tata kelola yang transparan, responsif, dan inklusif, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Mitra pembangunan dapat mendukung inisiatif perencanaan partisipatif di tingkat provinsi dan kabupaten, memperkuat suara masyarakat lokal, komunitas adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme akuntabilitas sosial seperti participatory budgeting, pemantauan belanja publik oleh warga, dan platform data terbuka juga perlu diperluas untuk memastikan transparansi penggunaan dana publik, termasuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

Mekanisme tambahan yang dapat dipertimbangkan adalah blended finance, yaitu kombinasi pendanaan publik dan swasta untuk membiayai inisiatif pengurangan ketimpangan. Blended finance dapat mengurangi risiko investasi di wilayah dan sektor yang kurang terlayani, mendorong partisipasi sektor swasta dalam proyek berdampak sosial. Misalnya, instrumen ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal—seperti jaringan jalan pedesaan atau fasilitas energi terbarukan—yang kurang menarik secara komersial. Mitra pembangunan dapat mengambil peran katalis dengan menyediakan guarantees, first-loss capital, atau pembiayaan bersubsidi (concessional financing). Inisiatif seperti ini sebaiknya dirancang dengan target dampak sosial yang jelas dan selaras dengan SDG 10.

Akhirnya, mitra pembangunan dapat membantu memastikan bahwa proyek infrastruktur berskala besar seperti relokasi IKN dilaksanakan dengan perlindungan lingkungan dan sosial yang memadai. Meskipun proyek ini membuka peluang pertumbuhan regional, terdapat risiko ketimpangan yang semakin besar jika tidak dikelola secara inklusif. Mitra pembangunan diharapkan mendorong dan mendanai pelaksanaan environmental impact assessment (EIA), proses konsultasi inklusif, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan. Dukungan terhadap reformasi tata kelola pertanahan, penyelesaian konflik, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara adil dan berkelanjutan secara lingkungan.

Temuan Inequality Diagnostic Report memberikan jalur strategis yang jelas bagi mitra pembangunan untuk mendukung upaya Indonesia dalam mengurangi ketimpangan. Penyelarasan intervensi dengan SDG 10 menyediakan kerangka kerja yang kohesif untuk merancang strategi, memantau kemajuan, dan memperkuat akuntabilitas. Dengan memanfaatkan keunggulan teknis, instrumen pembiayaan inovatif, dan peran sebagai penghubung lintas pemangku kepentingan, mitra pembangunan dapat menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

Aghion, P., Caroli, E., & Garcia-Penalosa, C. (1999). Inequality and economic growth: The perspective of the new growth theories. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1615–1660.

Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., ... & Thabrany, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75–102.

AHA Centre. (2018). Situation Update No. 1: Sulawesi Earthquake. Retrieved from https://ahacentre.org/wp-content/uploads/2018/09/AHA-Situation_Update-not-Sulawesi-EQ-rev.pdf

Bardhan, P. K. (2005). Scarcity, conflicts, and cooperation: Essays in the political and institutional economics of development. Cambridge, MA: MIT Press.

Corak, M. (2013). Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility. *Journal of Economic Perspectives*, 27(3), 79–102.

Daly, P., Mahdi, S., McCaughey, J., Mundzir, I., Halim, A., & Srimulyani, E. (2020). Rethinking relief, reconstruction and development: Evaluating the effectiveness and sustainability of post-disaster livelihood aid. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 49, 101650.

Erumban, A. A., & de Vries, G. J. (2024). Structural change and poverty reduction in developing economies. *World Development*, 106674.

Galor, O., & Moav, O. (2004). From physical to human capital accumulation: Inequality and the process of development. *Review of Economic Studies*, 71(4), 1001–1026.

Gansauer, G., Haggerty, J. H., Smith, K. K., Haggerty, M. N., & Roemer, K. F. (2024). Can infrastructure help 'left behind' places 'catch up?' Theorizing the role of built infrastructure in regional development. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 17(2), 393–406.

Handmer, J., & Choong, W. (2006). Disaster resilience through local economic activity in Phuket. *Australian Journal of Emergency Management*, 21(4), 8–15.

Lang, V., Redeker, N., & Bischof, D. (2022). Place-based policies and inequality within regions. *OSF Preprints*, 3. <https://doi.org/10.31219/osf.io/abcdef> (placeholder DOI—ganti dengan DOI asli jika tersedia)

Lichbach, M. I. (1989). An evaluation of 'Does economic inequality breed political conflict?' studies. *World Politics*, 41(4), 431–470.

LPEM-BPS (2024), *The Inequality Diagnostic Report for Indonesia*, AFD Editions <https://www.afd.fr/en/ressources/inequality-diagnostic-report-indonesia>

Mason, H. B., Montgomery, J., Gallant, A. P., Hutabarat, D., Reed, A. N., Wartman, J., ... & Yasin, W. (2021). East Palu Valley flowslides induced by the 2018 MW 7.5 Palu-Donggala earthquake. *Geomorphology*, 373, 107482.

Morsy, H., Shimeles, A., & Nabassaga, T. (2023). Structural change and inequality in Africa. *Journal of African Economies*, 32(Supplement_1), 228–245.

Neumark, D., & Simpson, H. (2015). Place-based policies. In G. Duranton, J. V. Henderson, & W. C. Strange (Eds.), *Handbook of regional and urban economics* (Vol. 5, pp. 1197–1287). Elsevier.

Prasad, S., Su, H. C., Altay, N., & Tata, J. (2015). Building disaster-resilient micro enterprises in the developing world. *Disasters*, 39(3), 447–466.

Roy, R. P., & Roy, S. S. (2017). Structural Change, Trade, and Inequality: Some Cross-Country Evidence. Manila: Asian Development Bank.

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved from <https://sdgs.un.org/2030agenda>

Vengadeshvaran, S., Saumik, P., & Guanghua, W. (2017). Structural Transformation, Growth, and Inequality: Evidence from Viet Nam. Manila: Asian Development Bank.

Wahidah, A. N., Leo, S., Vinca, R. Y., & Gustia, R. (2024). Memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Sustainable Urban Development and Environmental Impact Journal*, 1(1), 11–17.

World Bank. (2020). Addressing Inequality in Indonesia. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-inequality>

Daftar Singkatan

ACEIR	African Centre of Excellence for Inequality Research
AFD	Agence française de développement
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BKF	Badan Kebijakan Fiskal
BLK	Balai Latihan Kerja
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
DAK	Dana Alokasi Khusus
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
IKN	Ibu Kota Nusantara
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
LPEM FEB UI	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
NGO	Non-governmental Organization
OCOP	One Company, One Person
OVOP	One Village, One Product
PKH	Keluarga Harapan
PIP	Program Indonesia Pintar
PODES	Potensi Desa
SUSENAS	Survei Sosial dan Ekonomi Nasional
SAKERNAS	Survei Tenaga Kerja Nasional
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
UHC	Universal Health Coverage

Apa itu AFD?

Penerbit Agence française de développement (AFD) menerbitkan hasil evaluasi serta penelitian mengenai pembangunan berkelanjutan. Dilakukan dengan banyak mitra dari Utara dan Selatan, studi-studi ini berkontribusi pada analisis tantangan yang dihadapi planet ini, untuk lebih memahami, memprediksi, dan bertindak demi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dengan katalog lebih dari 1.000 judul, dan rata-rata 80 karya baru yang diterbitkan setiap tahun, Penerbit Agence française de développement mendukung penyebaran pengetahuan dan keahlian, melalui koleksi mereka sendiri dan kemitraan-kemitraan utama. Temukan semuanya dengan akses terbuka di editions.afd.fr.

Demi dunia kita bersama.

Penanggung Jawab Publikasi Rémy Rioux
Pemimpin Redaksi Thomas Melonio

Penyimpanan legal Triwulan I tahun 2025
ISSN 2492 - 2846

Kredit dan Perizinan

Creative Commons license

Atribusi – Nonkomersial – Tanpa perubahan

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



Desain grafis MeMo, Julie Gilles, D. Cazeils
Perancangan dan Pelaksanaan PUB
Dicetak oleh unit percetakan AFD

Untuk membaca publikasi:

<https://www.afd.fr/en/publications/list?collection%5B181%5D=181&type%5B170%5D=170&words=>